

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Rancangan Akhir Rencana Kerja **Tahun 2022**

Jalan Bhayangkara No Bhayangkara No.54, Bugis,
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75121



www.disnakkaltimprov.go.id



[Disnakkaltimprov](#)



[Peternakankaltimprov](#)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228
Samarinda 75121**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 085 Tahun 2021

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu disusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
 - c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja PERANGKAT DAERAH ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan PERANGKAT DAERAH Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

Kepala,

Mudawar, ST. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671129 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Peran pemerintah bersifat stimulus atau pengungkit khususnya dalam rangka revitalisasi pertanian untuk mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan, sehingga perkembangan peternakan tidak terlepas dari peran serta masyarakat peternakan sebagai pelaku usaha. Untuk itu diperlukan rencana kerja yang sinergi dan difasilitasi oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur, terutama dalam upaya kecukupan daging dan penyediaan komoditas peternakan lainnya, pemberdayaan ekonomi pedesaan serta memanfaatkan peluang pasar komoditas peternakan.

Samarinda, 19 Juli 2021

Kepala Dinas,



Munawar, ST. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671129 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan	27
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	41
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perangkat Daerah	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	69
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	71
3.3. Program dan Kegiatan	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	79
BAB V. PENUTUP	98
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN Tahun 2008-2020..... 19
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020..... 21
Tabel 2.3	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2020..... 30
Tabel 2.4	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Telur Tahun 2020..... 31
Tabel 2.5.	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2020 31
Tabel 2.6.	Pengadaan Ternak Tahun 2009-2020 32
Tabel 2.7.	Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (ekor)..... 34
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan... 40
Tabel 2.12	Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016–2020..... 46
Tabel 2.13	Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020..... 47
Tabel 2.14	Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020..... 48
Tabel 2.15	Review Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur 51
Tabel 2.16	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 64
Tabel 2.17	Daftar Usulan Langsung (ASPIRASI) Yang Sudah di verifikasi oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan TA. 2022..... 66
Tabel 2.18	Daftar Usulan Reses (POKIR) Yang Sudah di Verifikasi oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan TA. 2022..... 67
Tabel 3.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur..... 71
Tabel 3.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur..... 72
Tabel 3.3	Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator, dan Pendanaan Tahun 2022..... 73
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2022..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan salah satu bagian dari lima komoditas strategis nasional tersebut pada dasarnya adalah untuk penyediaan pangan hewani yang **Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)** maupun kuantitas dan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, upaya peningkatan populasi dengan sistem “Mini Ranch” sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat, serta keunggulan lainnya

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
4. Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah

berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Adapun prioritas Pembangunan Daerah 2019 – 2023 adalah :

1. Peningkatan daya sumber daya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengakomodasi Renja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2000/II/Bangda, tanggal 28 Februari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2016 Tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahan Renja SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai bahan acuan dan arahan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program/kegiatan bidang peternakan di Kalimantan Timur, sehingga tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi bidang peternakan di Kalimantan Timur, antara lain diindikasikan dalam hal :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (daging dan telur);
2. Meningkatkan efisiensi budidaya peternakan dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan jaminan keamanan pangan produk peternakan.

Tujuan yang diharapkan dari Renja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2022
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2022.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah tahun 2022
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah ditetapkan Program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai operasionalisasi dalam mensukseskan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang sekaligus sebagai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim Tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Adapun realisasi anggaran, rata-rata capaian kinerja serta predikat kinerja dari program dan kegiatan tersebut merupakan gabungan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet serta UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan rincian sebagai berikut :

A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp. 3.708.610.001,- dari pagu Rp. 3.212.851.810,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 95,82% berpredikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Capaian program ini adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) terealisasi sebesar 81% dari target 81% dengan capaian 100%. Tingkat kepuasan atau SKM ini dilakukan penilaian secara internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni:

a) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Januari-Desember) sebesar Rp. 3.708.610.001,- dari pagu Rp. 3.708.610.001,- dengan persentase tingkat capaian kinerja

keuangan sebesar 95,82% dan kinerja fisik (K) sebesar 100% yaitu sebagai berikut :

- Capaian kegiatan ini adalah jumlah surat yang diproses terealisasi 2.600 surat dari target 2.600 surat dengan capaian 100%. Surat masuk yang diproses sebanyak 2.600 surat dan didistribusikan sesuai disposisi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.225.418.132,- dari pagu dana Rp. 3.320.810.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,13% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Capaian program ini adalah Unit kerja PD yang memiliki kinerja tepat waktu terealisasi sebesar 5 unit kerja dari target 5 unit kerja dengan capaian 100%. Unit kerja Dinas yang memiliki kinerja tepat waktu yaitu Sekretariat, Bidang pasca panen dan Kesmavet, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan serta Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan. Kinerja tepat waktu meliputi: penyampaian laporan kinerja, laporan realisasi keuangan, administrasi pertanggungjawaban, penyampaian SKP, penyampaian pajak, dll. Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:

- a) Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan terealisasi 130 unit dari target 130 unit dengan capaian 100%. peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan yaitu kursi staf 74 unit, Peralatan olahraga 1 kegiatan, printer 15 unit, UPS 700 watt 10 Unit, bunga sintentis 10 unit, pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit, pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit, mesin penghancur kertas 2 unit, pengadaan kulkas 1 unit, pengadaan peralatan pencegahan covid 19 sebanyak 4 unit, komputer PC 11 unit, laptop 2 unit, scanner 2 unit, printer 2 unit, rak arsip 10 unit, pengadaan drone 1 unit, televise led 1 unit, pengadaan video conference 1 unit, pengadaan peralatan komunikasi 1 set dan radio HT 1 unit, serta kamera cctv 4 unit.

b) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki terealisasi 74 unit dari target 74 unit dengan capaian 100%. Peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki terdiri dari pemeliharaan taman dan gedung kantor, pemeliharaan alat kantor, perawatan kendaraan bermotor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi keuangan sebesar Rp 1.298.458.212,- dari pagu dana Rp. 1.382.666.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 93,91% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Capaian program ini adalah persentase ASN yang memiliki standar kompetensi terealisasi 12% dari target 12% dengan capaian 100%. Adapun Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:

a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi 160 kegiatan dari target 160 kegiatan dengan capaian 100%. kegiatan koordinasi dan konsultasi ini berupa kegiatan di luar daerah seperti koordinasi konsultasi program/kegiatan ke pusat, pertemuan dan menghadiri undangan dari non pemerintah. Sedangkan kegiatan ke dalam daerah berupa koordinasi, supervisi dan pemantauan.

b. Peningkatan sumber daya aparatur

Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ bimtek terealisasi 9 orang dari target 16 orang dengan capaian 56,55%. Pelatihan/bimtek yang diikuti ASN yaitu pelatihan yang diselenggarakan di dinas maupun di luar daerah.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.363.823.590,- dari pagu dana Rp. 1.446.665.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 94,27% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Capaian program ini adalah Nilai

Akuntabilitas Kinerja terealisasi 75,34 dari target 78,86 dengan capaian 95,54%. Saat ini Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan juara 1 (satu) dengan predikat BB (sangat baik). Namun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus bekerja keras untuk mencapai Nilai dengan Predikat A (≥ 80). Adapun Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 603.322.590,- dari pagu dana Rp. 628.550.000,- dan persentase tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 95,99% dan capaian kinerja fisik (K) 100%. Capaian kinerja fisik sampai dengan triwulan IV (empat) adalah sebagai berikut :
 - Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran terealisasi 12 dokumen dari 12 dokumen dengan capaian 100%. Dokumen Perencanaan dan Anggaran terdiri dari Renstra, Renja, PK, IKI, IKU, RUP, RKT dan Juklak, RKA Perubahan.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dengan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp 760.501.000,- dari pagu dana Rp. 818.115.500,- dan persentase tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 92,96% dan capaian kinerja fisik (K) 100%. Capaian kinerja fisik sampai dengan triwulan IV (empat) adalah sebagai berikut :
 - Capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 17 dokumen dari 17 dokumen dengan capaian 100%. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Lakin, LPPD, LKPJ, Simontepa, Lap evaluasi hasil renja, lap bulanan APBD dan APBN, e-monev bappenas, lap DAK triwulan, Pengukuran Kinerja, monev capaian PK triwulan, Lap monev capaian PK triwulan, lap monev capaian rencana aksi triwulan, Laporan SPIP APBD.

5. Program Hilirisasi Produk Peternakan

Program Hilirisasi Produk Peternakan terealisasi keuangannya sebesar Rp. 1.412.743.894,- dari pagu dana Rp. 1.506.200.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 93,80% predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 100% dengan predikat kinerja

Sangat Tinggi (ST). Capaian Program Hilirisasi Produk Peternakan pada triwulan IV (empat) yaitu Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebesar 11% dari target 11%. Adapun Program Hilirisasi Produk Peternakan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan dengan pagu dana Rp. 401.962.500 terealisasi Rp. 396.337.454,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,60% dan capaian kinerja fisik 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan terealisasi sebanyak 2 unit usaha dari target 2 unit usaha dengan capaian 100%. Kelompok Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang dilakukan pendamping yaitu kelompok usaha “Sukses Mandiri” di Kota Samarinda dan kelompok usaha “Al-Hasanah” di Kabupaten Paser.
- Kegiatan Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan dengan pagu dana Rp. 510.375.000,- terealisasi sebesar Rp. 431.845.200,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 84,61% dan capaian kinerja fisik 36,67%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazaar terealisasi sebesar Rp.55.000.000 dari target Rp.150.000.000 dengan capaian 36,67%. Upaya dalam peningkatan omset pemasaran produk peternakan dari berbagai promosi atau pameran peternakan yaitu Kaltim Expo dan Indonesia Quality Expo (IEQ). Rendahnya capaian tersebut diatas dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari adanya pandemic covid-19.
- Kegiatan Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak dengan pagu dana Rp. 593.862.500,- terealisasi sebesar Rp. 584.561.240,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,43% dan capaian kinerja fisik 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan terealisasi sebanyak 30 unit usaha dari target 30 unit usaha dengan capaian 100%. Unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu PT.Foodmart Kebun Sayur, UD. Maju Bersama, PT. Balikpapan Boga Utama, PT. Hero Supermarket, PT. Trans Retail Indonesia, PT. Agro Boga Utama, PT. Diomandfair, UD. Nindy Frozen, RPA Mugi Mulyo, CV Mahakam Kaltim, Foodmart Lembuswana, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi

(KIMIRAN), Budidaya ternak petelur ayam makmur, bulog kancapem tanjung redeb, CV. Vanda Sukses Pangan, bulog kancapem tanah grogot,

6. Program Pengembangan Usaha Peternakan

Program Pengembangan Usaha Peternakan dengan pagu dana Rp. 4.423.275.000,- dengan terealisasi Rp. 4.181.130.744,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 94,53% dengan predikat kinerja Tinggi (ST), untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan pada triwulan 4 (empat) yaitu:

1. Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) dengan target 118,5 terealisasi sampai dengan triwulan 4 (empat) sebesar 102,98 dengan capaian 86,90%.
2. Jumlah miniranch yang teregister dengan target 35 unit miniranch terealisasi sampai dengan triwulan 4 (empat) sebesar 12 unit dengan capaian 34,29%. Dikarenakan ada refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 maka jumlah miniranch yang teregister sebanyak 12 unit

Adapun Program Pengembangan Usaha Peternakan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengembangan Kawasan Peternakan dengan pagu dana Rp. 2.990.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.967.235.600,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,21% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah bibit hijauan pakan ternak terealisasi 100.000 stek/pols dari target 100.000 steks/pols dengan capaian 100%.
- Kegiatan Pengembangan Informasi Peternakan dengan pagu dana sebesar Rp. 295.000.000,- terealisasi Rp. 279.392.300,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,71% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah database, statistik peternakan, NBM dan data fungsi peternakan terealisasi 4 dokumen dari target 4 dokumen dengan capaian 100%
- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan pagu dana Rp. 1.137.475.000,- terealisasi sampai dengan triwulan IV (empat) sebesar Rp. 934.502.844,-, sehingga rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar

82,16% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah peternak debitur subsektor peternakan terealisasi sebanyak 50 orang dari target 50 orang dengan capaian 100%.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.379.112.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.299.196,554,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar (Rp) 95,64% predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada triwulan 4 (empat) yaitu Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terealisasi 35 unit kompartemen dari target 35 unit kompartemen dengan capaian 100%. Kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terdapat di 1). Kutai Kartanegara (kelompok banteng perjuangan, kampung muhur, kec. muara begai), 2). PPU (kelompok sumber rejeki, kel. saloloang, kec. penajam), 3). Paser (kelompok gawi bersama, desa saing prupuk, kec. batu engau), 4). Kutai Timur 2 (dua) kompartemen yaitu kelompok sumber mulyo (desa manunggal jaya, kec. rantau pulung) dan kelompok sumber rejeki (desa manunggal jaya, kec. rantau pulung). Adapun Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yakni:

- Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dengan pagu dana Rp. 1.254.912.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.203.963.588,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 95,94% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah hewan/ternak yang divaksinasi sebanyak 10.000 ekor dari target 10.000 ekor dengan capaian 100%. Pelaksanaan vaksinasi dengan target vaksin rabies 5.000 dosis terealisasi sebagai berikut di Kutai Barat 2.537 ekor, Samarinda 488 ekor, dan PPU 1.235 ekor. Sedangkan vaksinasi jembrana dari target 5.000 dosis dengan pelaksanaannya sebagai berikut di Samarinda 1.550 ekor, PPU 6.321 ekor, Berau 500 ekor dan Kutai Barat 300 ekor dan di Bontang 500 ekor.
- Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dengan pagu dana Rp. 373.250.000,- terealisasi pada triwulan IV (empat) sebesar Rp. 347.245.950,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 93,03% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Artinya sampai

dengan triwulan IV (empat) jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan terealisasi 10 kabupaten/kota dari target 10 kabupaten/kota dengan capaian 100%. Pengawasan lalu lintas hewan jalur darat dilakukan di pos pemeriksaan kesehatan hewan (checkpoint) dan antar kabupaten/kota.

Pengawasan lalu lintas hewan di 3 (tiga) perbatasan yaitu :

- Checkpoint Muara Komam di perbatasan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Checkpoint Batu Engau di perbatasan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Checkpoint Gunung Tabur di Perbatasan Kabupaten Berau dengan Malaysia.

Saat ini checkpoint yang sudah difasilitasi adalah Checkpoint Muara Komam

- Kegiatan Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan dengan pagu dana Rp. 750.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 747.987.016,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,61% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut:
- Jumlah hewan yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan terealisasi sebanyak 1.425 ekor dari target 1.425 ekor dengan capaian 100%.

8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan dengan pagu dana Rp. 7.061.441.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.069.277.363,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 85,95% dengan predikat kinerja Tinggi (T) dan capaian kinerja fisik sebesar 85,95% dengan predikat kinerja Tinggi (T). Capaian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan pada triwulan 4 (empat) yaitu:

1. Angka kelahiran sapi terealisasi sebesar 20,10% dari target 20% dengan capaian 100,5%.
2. Calving interval terealisasi 18,18 bulan dari target 18 bulan dengan capaian 99%.

Adapun Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak dengan pagu dana sebesar Rp. 3.797.363.500,- sudah terealisasi sebesar Rp. 3.193.169.867,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 84,09% dan capaian kinerja fisik sebesar 84,09%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut:
 - Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat keterangan Layak Bibit) terealisasi sebanyak 120 ekor dari target 100 ekor dengan capaian 120%.
 - Service per Conception terealisasi 1,76 dari target 1,75 dengan capaian 99,43%.
- Kegiatan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan pagu dana Rp. 972.250.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 939.312.800,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 96,61% dan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah kelompok budidaya yang dilakukan pendampingan terealisasi 1 kelompok dari target 1 kelompok dengan capaian 100%.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak dengan pagu sebesar Rp. 2.291.827.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.936.794.696,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 84,51% dan capaian kinerja fisik 84,51%. Pada triwulan IV (empat), capaian kinerja fisik adalah sebagai berikut jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi terealisasi sebanyak 14 proposal dari target 14 proposal dengan capaian 100%. Proposal bantuan ini diajukan oleh peternak melalui dinas kabupaten/kota dan diverifikasi oleh dinas provinsi.

B. UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Oktober - Desember) sebesar Rp. 1.482.963.285,- dari pagu Rp. 1.588.426.072,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 93,36% berpredikat kinerja Sangat Tinggi (ST), untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian program ini adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan

terhadap pelayanan PD (SKM) terealisasi sebesar 80,6% dari target 81% dengan capaian 99,51%. Tingkat kepuasan atau SKM ini dilakukan penilaian secara eksternal terhadap pelayanan UPTD melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pelanggan/customer. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni:

a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp. 1.482.963.285,- dari pagu Rp. 1.588.426.072,- dengan persentase tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 93,36% dan kinerja fisik (K) sebesar 100% yaitu sebagai berikut capaian kegiatan ini adalah jumlah surat yang diproses terealisasi 251 surat dari target 250 surat dengan capaian 100,4%. Surat masuk yang diproses sebanyak 251 surat dan didistribusikan sesuai disposisi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 599.348.650,- dari pagu dana Rp. 503.369.048,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 83,99% dengan predikat kinerja Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 83,99% dengan predikat kinerja Tinggi (T). Capaian program ini adalah Unit kerja PD yang memiliki kinerja tepat waktu terealisasi sebesar 3 unit kerja dari target 3 unit kerja dengan capaian 100%. Unit kerja Dinas yang memiliki kinerja tepat waktu yaitu Subbagian TU, Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak serta Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak. Kinerja tepat waktu meliputi: penyampaian laporan kinerja, laporan realisasi keuangan, administrasi pertanggungjawaban, penyampaian SKP, penyampaian pajak, dll.

a. Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan terealisasi 16 unit dari target 20 unit dengan capaian 80%.

b. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasaran capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki terealisasi 5 unit dari target 5 unit dengan capaian 100%. Peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki terdiri dari pemeliharaan komputer 3 unit, mesin pemotong rumput 1 unit dan genset 1 unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi keuangan sebesar Rp 335.899.736,- dari pagu dana Rp. 374.295.500,- dengan rata – rata capaian kinerja keuangan 89,74% predikat kinerja Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 89,74% predikat kinerja Tinggi (ST). Capaian program ini adalah persentase ASN yang memiliki standar kompetensi terealisasi 11% dari target 12% dengan capaian 91,67%.

- a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi 140 kegiatan dari target 140 kegiatan dengan capaian 100%. kegiatan koordinasi dan konsultasi ini berupa kegiatan di luar daerah seperti koordinasi konsultasi program/kegiatan ke pusat, pertemuan dan menghadiri undangan dari non pemerintah. Sedangkan kegiatan ke dalam daerah berupa koordinasi, supervisi dan pemantauan
- b. Peningkatan sumber daya aparatur capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ bimtek terealisasi 2 orang dari target 3 orang dengan capaian 66,67%. Pelatihan/bimtek yang diikuti ASN yaitu pelatihan yang diselenggarakan di dinas maupun di luar daerah. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

4. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak dengan pagu dana sebesar Rp. 1.464.950.000, terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.397.178.357,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 95,37% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) yakni 100% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Capaian Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak pada triwulan 4 (empat) yaitu Peningkatan produksi bibit ternak & HPT terealisasi 6,6% dari target 11% dengan capaian 60%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan populasi sapi di Kalimantan Timur

- a. Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak capaian output kegiatan peningkatan produksi dan distribusi semen beku adalah jumlah sapi kelahiran sapi bibit dan rusa terealisasi sebanyak 24 ekor dari target 40

ekor dengan capaian 60%. Jumlah sapi bali bibit yang lahir sebanyak 13 ekor dan rusa bibit 11 ekor.

Permasalahan : Untuk mencapai target kelahiran produksi bibit perlunya dilakukan replacement induk sapi betina dan pemberian tambahan pakan secara continue

- b. Kegiatan Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian output adalah produksi HPT terealisasi sebesar 1.005 ton dari target 750 ton dengan capaian 134%. Sedangkan jumlah bibit HPT yang diproduksi sebesar 6.000 stek/pols dari target 5.000 stek/pols dengan capaian 120%.

C. UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp. 975.320.072,- dari pagu Rp. 1.028.052.592,50,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 94,87% berpredikat kinerja Sangat Tinggi (ST), untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian program ini adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) terealisasi sebesar 81% dari target 81% dengan capaian 100%. Tingkat kepuasan atau SKM ini dilakukan penilaian secara eksternal terhadap pelayanan UPTD melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pelanggan/customer. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dengan realisasi keuangan Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp. Rp. 975.320.072,- dari pagu Rp. 1.028.052.592,50,- dengan persentase tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,85% dan kinerja fisik (K) sebesar 100% yaitu sebagai berikut capaian kegiatan ini adalah jumlah surat yang diproses terealisasi 240 surat dari target 240 surat dengan capaian 100%. Surat masuk yang diproses sebanyak 240 surat dan didistribusikan sesuai disposisi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 419.881.528,- dari pagu dana Rp. 430.099.100,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 97,62% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian program ini adalah Unit kerja PD yang memiliki kinerja tepat waktu terealisasi sebesar 3 unit kerja dari target 3 unit kerja dengan capaian 100%. Unit kerja Dinas yang memiliki kinerja tepat waktu yaitu Subbagian TU, Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan serta Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan. Kinerja tepat waktu meliputi: penyampaian laporan kinerja, laporan realisasi keuangan, administrasi pertanggungjawaban, penyampaian SKP, penyampaian pajak.
 - a. Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan terealisasi 11 unit dari target 11 unit dengan capaian 100%.
 - b. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasaran capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki terealisasi 49 unit dari target 49 unit dengan capaian 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi keuangan sebesar Rp 315.469.655,- dari pagu dana Rp. 396.175.000,- dengan rata – rata capaian kinerja keuangan 79,63% predikat kinerja Sedang (S) dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 79,63% predikat kinerja Sedang (S). Capaian program ini adalah persentase ASN yang memiliki standar kompetensi terealisasi 12% dari target 12% dengan capaian 100%.
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi terealisasi 36 kegiatan dari target 36 kegiatan dengan capaian 100%. kegiatan koordinasi dan konsultasi ini berupa kegiatan di luar daerah seperti koordinasi konsultasi program/kegiatan ke pusat, pertemuan dan menghadiri undangan dari non pemerintah. Sedangkan kegiatan ke dalam daerah berupa koordinasi, supervisi dan pemantauan

- b. Peningkatan sumber daya aparatur capaian output dari kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ bimtek terealisasi 6 orang dari target 6 orang dengan capaian 100%. Pelatihan/bimtek yang diikuti ASN yaitu pelatihan yang diselenggarakan di dinas maupun di luar daerah.

4. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet dengan pagu dana Rp. 1.030.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.025.555.475, sehingga rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,55% predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet pada triwulan 4 (empat) yaitu Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%) terealisasi sebesar 12% dari target 12% dengan capaian 100%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan produksi daging dan populasi di Kalimantan Timur diperlukan surveilans pemeriksaan penyakit hewan dan produk pangan asal hewan melalui pengambilan sampel penyakit hewan dan produk pangan asal ternak.

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, dengan capaian output adalah Jumlah sampel penyakit hewan terealisasi 4.722 sampel dari target 4.722 sampel dengan capaian 100%. Surveillans dan monitoring Pangan Asal Hewan tidak berjalan sesuai target waktu yang telah direncanakan, dikarenakan pandemi Covid 19.

- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan capaian output yaitu Jumlah sampel penyakit hewan terealisasi 660 sampel dari target 733 sampel dengan capaian 733%. Surveillans dan monitoring Pangan Asal Hewan tidak berjalan sesuai target waktu yang telah direncanakan, dikarenakan pandemi Covid 19.

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur selain bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga bersumber dari dana APBN yang berasal dari kegiatan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pengalokasian berupa Tugas Pembantuan. Dukungan anggaran APBD dan APBN sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dukungan Anggaran APBD Provinsi dan APBN tahun 2008 s/d 2020

No	Tahun Anggaran	APBN Tugas Pembantuan (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2008	11.816.193.688 Realisasi 97,23 %	14.652.220.346 Realisasi 91,02%	26.468.414.034
2.	2009	12.001.119.758 Realisasi 92,68 %	29.867.648.163 Realisasi 93,53 %	41.868.767.921
3.	2010	12.303.500.000 Realisasi 97,30 %	41.080.147.000 Realisasi 88,85 %	53.383.647.000
4.	2011	43.321.540.000 Realisasi 88,91 %	47.833.050.500 Realisasi 91,02 %	91.154.590.500
5.	2012	31.367.206.000 Realisasi 81,05 %	54.784.714.000 Realisasi 95,72 %	86.151.920.000
6.	2013	35.086.258.000 Realisasi 96,03%	72.318.668.123 Realisasi 94,53%	107.404.926.123
7.	2014	30.764.230.000 Realisasi 73,79%	67.517.958.263,50 Realisasi 94,80%	98.282.188.263,50
8.	2015	307.682.215.000 Realisasi 46,28%	80.919.778.040 Realisasi 74,52%	388.601.993.040
9.	2016	25.083.899.000 Realisasi 91,63%	59.605.749.228 Realisasi 94,59%	81.466.766.834
10.	2017	8.332.948.000 Realisasi 90,00%	20.299.891.000 Realisasi 90,68%	28.622.839.000
11.	2018	3.413.441.000 Realisasi 94,86%	22.157.153.540,07 Realisasi 96,39%	25.570.594.540,07
12	2019	7.156.453.000 Realisasi 96,61%	46.903.080.000 Realisasi 91,99%	54.059.533.000

No	Tahun Anggaran	APBN Tugas Pembantuan (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)
13	2020	4.133.774.000 Realisasi 95,29%	46.634.207.724 Realisasi 90,21%	42.500.433.724

Dana APBN merupakan akumulasi Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada Tahun anggaran 2020, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.634.207.724 termasuk belanja langsung dan tidak langsung. Realisasi keuangan selama tahun 2020 mencapai 90,21% atau sebesar Rp 42.071.279.573,33. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan tersebut merupakan perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	K	Rp			K	K
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9		10		11 = 10/9*100	12 = 7 + 10	13 = 12/4			
			K	Rp	K	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K		
1	3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84	%	15.280.286.560	80	80	80	100	81	3.212.851.810	81	3.078.610.001	100	96	81	96,43
	3.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	2.900	Surat	15.280.286.560	580	2.500	2.500	100	2.600	3.212.851.810	2.600	3.078.610.001	100	95,82	2.600	89,66
Rata - rata capaian kinerja (%)													100	95,82		93,04		
Predikat Kinerja													ST	ST		ST		
2	3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	Unit	14.602.788.814	1	5	5	100	5	3.320.810.000	5,00	3.225.418.132	100,00	97,13	5	100,00
	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	150	Unit	3.343.300.000	-	84	84	100	130	2.189.700.000	130	2.140.067.880	100,00	97,73	130	86,67
	3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	90	Unit	11.259.488.814	70	74	74	100	74	1.131.110.000	74	1.085.350.252	100,00	95,95	74	82,22
			Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihan	4.427	M2		800	4.427	4.427	100	4.427		4427	0	100,00		4.427	100,00
Rata - rata capaian kinerja (%)													100,00	96,94		92,22		
Predikat Kinerja													ST	ST		ST		
3	3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15	%	8.232.862.000	1	11	11	100	12	1.382.666.000	12	1.298.458.212	100,00	93,91	12	80,00
	3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	170	Kegiatan	6.785.446.000	151	149	149	100	160	1.219.450.000	160	1.206.166.866	100,00	98,91	160	94,12
	3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	84	Orang	1.447.416.000	-	14	7	50	16	163.216.000	9	92.291.346	56,25	56,55	16	19,05
Rata - rata capaian kinerja (%)													85,42	83,12		64,39		
Predikat Kinerja													T	T		R		

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 s/d 2024
				K		Rp	K	K	K	8 = (7/6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11 = 10/9*100		12 = 7 + 10	K
				6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 10/9*100	12 = 7 + 10	K									
4	3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,36	Nilai	6.879.867.000	77,86	78,36	79,45	101	78,86	1.446.665.500	75,34	1.363.823.590	95,54	94,27	75,34	93,75		
	3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	12	Dokumen	3.781.751.500	12	12	12	100	12	628.550.000	12	603.322.590	100,00	95,99	12	100,00		
	3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	17	Laporan	3.098.115.500	17	17	17	100	17	818.115.500	17	760.501.000	100,00	92,96	17	100,00		
Rata - rata capaian kinerja (%)															98,51	94,41		97,92		
Predikat Kinerja															ST	ST		ST		
5	3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	119	Nilai Konstanta	36.431.175.000	-	118	124	105	118,5	4.423.275.000	102,98	4.181.130.744	86,90	94,53	103	86,54		
			Jumlah Miniranch yang terregister	125	Miniranch	-	-	5	5	100	35	12,00	34,29	17	13,60					
	3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	500.000	Stek/Polis	30.140.700.000	-	100.000	90.000	90	100.000	2.990.800.000	70.000,00	2.967.235.600	70,00	99,21	160.000	32,00		
	3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	4	Dokumen	2.715.000.000	4	4	4	100	4	295.000.000	4	279.392.300	100,00	94,71	4	100,00		
	3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE, dll)	65	Orang	3.575.475.000	60	50	50	100	50	1.137.475.000	50	934.502.844	100,00	82,16	100	153,85		
Rata - rata capaian kinerja (%)															78,24	92,65		77,20		
Predikat Kinerja															ST	ST		T		
6	3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	14	%	7.109.518.000	2	10	10	100	11	1.506.200.000	11,00	1.412.743.894	100,00	93,80	11	78,57		
	3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	10	Unit usaha	1.743.580.500	1	2	2	100	2	401.962.500	2,00	396.337.454	100,00	98,60	4	40,00		
	3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk dalam pameran/bazar	775.000.000	Rp	3.300.075.000	-	125.000.000	125.000.000	100	150.000.000	510.375.000	125.000.000	431.845.200	83,33	84,61	250.000.000	32,26		
	3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30	Unit usaha	2.065.862.500	-	30	30	100	30	593.862.500	30	584.561.240	100,00	98,43	30	100,00		
Rata - rata capaian kinerja (%)															95,83	93,86		62,71		
Predikat Kinerja															T	ST		R		

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020 (%)		
				4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10		11 = 10/9*100			12 = 7 + 10	13 = 12/4
				K	Rp		K	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	K
7	3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana (unit)	125	Unit	11.397.705.000	-	5	5	100	35	2.379.112.500	35,00	2.299.196.554	100,00	96,64	40	32,00	
	3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi	50.000	Ekor	3.646.612.500	-	10.000	7.300	73	10.000	1.254.912.500	13,431	1.203.963.588	134,31	95,94	20.731	41,46	
	3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	10	Kab/Kota	4.435.150.000	-	10	10	100	10	373.250.000	10,00	347.245.950	100,00	93,03	10	100,00	
	3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah ternak/hewan yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	6.825	Ekor	3.315.942.500	-	1.400	1.400	100	1.425	750.950.000	1,425	747.987.016	100,00	99,61	2.825	41,39	
Rata - rata capaian kinerja (%)														108,58	96,30			53,71	
Predikat Kinerja														ST	ST			R	
8	3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	22	%	36.959.861.000	-	20	17,49	87	20	7.061.441.000	20,10	6.069.277.363	100,50	85,95	20	91,36	
			Calving Interval	16	Bulan		-	18	18,80	96	18		18,18	-	98,28		18	113,63	
	3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	560	Ekor	25.695.783.500	50	100	105	105	100	3.797.363.500	120,00	3.193.169.867	120,00	84,09	225	40,18	
			Service per Conception	1,6	Nilai Konstanta		1,98	1,8	1,86	97	1,75		1,76		100,57		2	110,00	
	3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	11	Kelompok	5.422.250.000	-	1	1	100	1	972.250.000	1	939.312.800	100,00	96,61	2	18,18	
	3.03.90.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	80	Proposal	5.841.827.500	12	12	12	100	14	2.291.827.500	14	1.936.794.696	100,00	84,51	26	32,50	
Rata - rata capaian kinerja (%)														103,22	87,79			67,64	
Predikat Kinerja														ST	T			S	
9	3.03.08.02	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) UPTD. Lab Keswan dan Kesmavet	84	%	5.006.311.334	80	80	80	100	81	1.028.052.592	81,00	975.320.072	100,00	94,87	81	96,43	
	3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	330	Surat	5.006.311.334	25	210	210	100	240	1.028.052.592	240,00	975.320.072	100,00	94,87	240	72,73	
Rata - rata capaian kinerja (%)														100,00	94,87			84,58	
Predikat Kinerja														ST	ST			T	

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020 (%)	
				K	Rp		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)	9		10		11 = 10/9*100		12 = 7 + 10	13 = 12/4		
				K	Rp	K	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K		
10	3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu UPTD. Lab Keswan dan Kesmavet	3	Unit	2.050.245.546	1	3	3	100	3	430.099.100	3	419.881.529	100,00	97,62	3	100,00
	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	6	Unit	680.695.000	-	4	4	100	11	164.020.000	11	162.152.640	100,00	98,86	11	183,33
	3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	49	Unit	1.369.550.546	2	45	45	100	49	266.079.100	49	257.728.888	100,00	96,86	49	100,00
			Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihan	686	M2	-	-	686	686	100	686	-	686	-	100,00	-	686	100,00
													100,00	97,78		120,83		
11	3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi UPTD. Lab Keswan dan Kesmavet	15	%	1.714.175.000	1	11	11	100	12	396.175.000	12,00	315.469.655	100,00	79,63	12	80,00
	3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	51	Kegiatan	1.292.875.000	16	8	8	100	36	281.875.000	36	281.867.255	100,00	100,00	36	70,59
	3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	32	Orang	421.300.000	-	1	1	100	6	114.300.000	6	33.602.400	100,00	29,40	6	18,75
													Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	69,67		56,45	
12	3.03.07.01	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	15	%	8.403.090.000	6	11	11	100	12	1.030.200.000	12	1.025.555.475	100,00	99,55	12	80,00
	3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan	25.042	Sampel	3.856.272.400	450	4.240	4.240	100	4.722	396.100.000	4.722	395.598.653	100,00	99,87	8.962	35,79
	3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	4.046	Sampel	4.046.817.600	300	660	660	100	733	634.100.000	733	629.956.822	100,00	99,35	1.393	34,43
	3.03.92.03	Pembangunan/ Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1	Unit	500.000.000	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100,00
													Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,59		62,55	
													Predikat Kinerja	ST	ST		R	

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp		K	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9		10		11 = 10/9*100		12 = 7 + 10	13 = 12/4		
13	3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) UPTD. Pembibitan Ternak dan	84	%	6.573.166.758	80	80	80	100	81	1.588.426.072	80,60	1.482.963.285	99,51	93,36	81	95,95
	3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	250	Surat	6.573.166.758	213	250	250	100	250	1.588.426.072	251,00	1.482.963.285	100,40	93,36	251	100,40
Rata - rata capaian kinerja (%)														99,95	93,36		98,18	
14	3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	Unit	6.922.748.650	1	3	3	100	3	599.348.650	3	503.369.048	100,00	83,99	3	100,00
	3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	20	Unit	544.900.000	-	20	20	100	20	76.400.000	16	74.092.880	80,00	96,98	16	80,00
	3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	25	Unit	6.377.848.650	5	5	5	100	5	522.948.650	5	429.276.168	100,00	82,09	10	40,00
			Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihan	1.000	M2		1.000	1.000	1.000	100	1.000		1.000	-	100,00		1.000	100,00
Rata - rata capaian kinerja (%)														95,00	87,68		80,00	
15	3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan	15	%	1.698.657.500	1	11	11	100	12	423.437.500	11,00	335.899.736	91,67	79,33	11	73,33
	3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	140	Kegiatan	1.180.857.500	93	140	140	100	140	358.437.500	140	320.041.736	100,00	89,29	140	100,00
	3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	14	Orang	517.800.000	-	3	2	66,67	3	65.000.000	2	15.858.000	66,67	24,40	4	28,57
Rata - rata capaian kinerja (%)														86,11	64,34		67,30	
Predikat Kinerja														T	R		S	

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2019 s/d 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2020 (%)		
				K	Rp		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9		10		11 = 10/9*100		12 = 7 + 10	13 = 12/4		
			K	Rp	K	K	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K		
16	3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	14	%	13.105.110.000	-	10	9,8	98	11	1.464.950.000	11,00	1.397.178.357	100,00	95,37	11	78,57
	3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit	200	Ekor	2.678.604.000	33	40	32	80	40	589.200.000	24,00	559.372.204	60,00	94,94	56	28,00
	3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	3.800	Ton	3.391.600.000	700	700	700	100	750	875.750.000	1.005,00	837.806.153	134,00	95,67	1.705	44,87
			Jumlah bibit HPT yang diproduksi	27.000	Stek/Pol		-	5.000	5.000	100	5.000		6.000,00			120,00		11.000
	3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung	7	Unit	6.358.050.000	-	7	7	100	-	-	-	-	-	-	7	100,00
Rata - rata capaian kinerja (%)													103,50	95,33		58,44		
Predikat Kinerja													ST	ST		R		
Total Rata-rata capaian kinerja (%)													97,15	90,22		77,32		
Total Predikat Kinerja													ST	ST		T		

Samarinda, Juli 2021
Kepala,

Munawwar, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671129 199803 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No, 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perangkat daerah tersebut dilakukan penataan kembali. Sehingga terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi. Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tersebut terdiri atas 1 (satu) Esselon II yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; 21 (dua puluh satu) Esselon IV yaitu 5 (lima) orang Kepala Sub Bagian dan 16 (lima belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, membawahi 7(tujuh) unit Esselon III, meliputi:

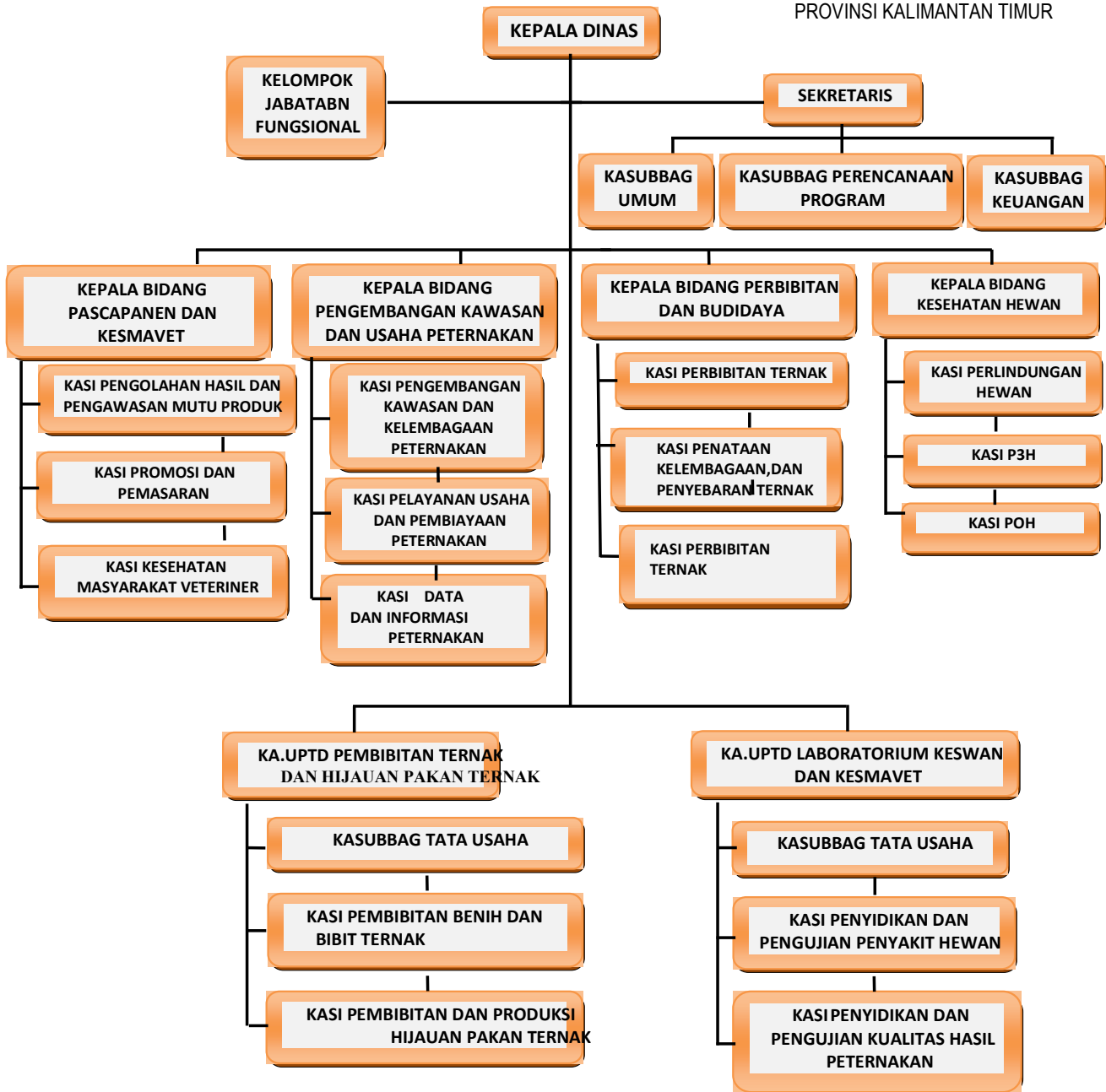
1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Seksi Perbibitan Ternak
 - b. Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan
 - c. Seksi Penataan, Kelembagaan, dan Penyebaran Ternak

3. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak
 - b. Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan
 - c. Seksi Data dan Informasi Peternakan
4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Seksi Perlindungan Hewan
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan
5. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi), yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Gambar Bagan** berikut

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XXII PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 09TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Nopember 2016
TENTANG : STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya produksi pangan asal hewan

Indikator:

1. Produksi Daging

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Peningkatan produksi daging ini tidak terlepas dari peningkatan populasi komoditas tersebut yang berasal dari lokal/dalam Kaltim.

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	85.479,7	80.917,96	94,66

Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengonsumsi protein hewani. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi daging sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi daging sebesar 94,66%. Sehingga untuk ketersediaan daging dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

2. Produksi Telur

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Telur Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Telur	Ton	12.058,60	11.386,31	94,42

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya produksi pangan asal ternak terutama produksi telur sampai dengan semester II terealisasi persentase capaian produksi telur sebesar 94,42%. Sehingga untuk ketersediaan telur dapat dikatakan cukup untuk di konsumsi.

Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Indikator:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 2.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	104,5	102,54	98,12

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sampai dengan semester II sangat baik, karena terealisasi 102,54 dari target 104,5 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,12% artinya sepanjang tahun 2020 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi ketimbang biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi.

PENGADAAN TERNAK

Pengadaan Ternak bibit setiap tahun cenderung meningkat baik bersumber dari Anggaran APBD maupun dari Anggaran APBN. Pengadaan ternak sejak tahun 2009 sampai dengan 2020 dari anggaran APBD Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pengadaan Ternak Tahun 2009-2020

No	Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
	2009	Sapi Bali	920	920	100
		Kerbau	30	30	100
		Kambing	235	235	100
	2010	Sapi Bali	1.116	1.116	100
		Kerbau	30	30	100
		Kambing	-	-	-
	2011	Sapi Bali	1.219	1.219	100
		Sapi BC	100	100	100
		Babi	175	175	100
		Kerbau	50	62	124
		Kelinci	-	-	-
		Kambing/Domba	-	-	-
		Itik	3.300	3.300	100
	2012	Sapi Bali	1.900	1.820	96
		Sapi BC	100	150	150
		Babi	175	175	100
		Kerbau	30	30	100
		Itik	3.300	3.300	100
		Kerbau	100	100	100
	2013	Sapi Bibit	1.800	1478	82,11
		Sapi Bakalan	400	250	62,5
		Sapi Potong	1080	1080	100
		Sapi BC	175	175	100
	2014	Sapi Bibit	1.580	1.580	100

No	Tahun	Jenis Ternak	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Presentase (%)
		Sapi Bakalan	776	776	100
		Sapi Potong	195	195	100
	2015	Sapi Bibit	483	483	100
		Sapi Bakalan	472	472	100
		Sapi Potong	200	200	100
		Babi	125	125	125
		Sapi BC	950	95	10
	2016	Sapi Bibit	480	480	100
		Sapi Bakalan	50	50	100
		Sapi Potong	220	220	100
		Sapi PO	365	365	100
		Kambing	450	450	100
	2017	Sapi Bali	25	25	100
		Itik	400	400	100
	2018	Sapi Bali	115	115	100
	2019	Sapi Jantan	15	15	100
		Pejantan Pemacek Sapi Bali	80	80	100
		Pemacek Brahman Cross	20	20	100
		Sapi Bali Jantan dan Betina	108	108	100
	2020	Sapi Bali Jantan	368	368	100

PERMASALAHAN

A. Permasalahan

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah *“Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Peningkatan Konsumsi”*, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

a). Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah;

Peningkatan populasi di Kalimantan Timur pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, terutama pada ternak sapi pada tahun 2016 populasi berjumlah 118.712 ekor pada tahun 2020 populasi berjumlah 123.069 ekor, berdasarkan data tersebut peningkatan yang terjadi pada populasi ternak sapi hanya sebesar 0,91% tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 2.7. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, kemampuan petugas belum optimal, Good Farming Practice tidak diterapkan dengan baik, perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal, pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal.

Tabel. 2.7 Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (ekor)

No	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020*	r (%)
1	Sapi	118.712	119.123	117.504	119.485	123.069	0,91
2	Sapi Perah	97	107	110	91	92	-1,31
3	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.255	-3,27
4	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929	4,88
5	Domba	320	281	439	590	596	16,82
6	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	85.022	3,02
7	Kuda	101	91	97	102	103	0,49
8	Ayam Buras	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.591.035	-0,94
9	Ayam Petelur	842.176	822.533	1.702.178	853.693	896.378	0,68
10	Ayam Pedaging	60.747.455	66.268.201	62.310.692	67.886.566	71.280.894	4,08
11	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	267.418	8,56
12	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	9.302	-8,14
13	Puyuh	68.643	46.693	66.593	65.808	67.124	-0,56
14	Merpati	4.182	4.163	4.027	4.776	5.015	4,65

No	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020*	r (%)
15	Itik Manila	25.215	35.834	42.851	42.890	43.319	14,49

Sumber data : Buku Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah pemotongan per tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi saat ini 123.069 ekor sehingga masih perlu penambahan 307.950 ekor.

Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Bobot lahir rata-rata 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
2. Bobot potong sapi rata-rata 251 kg
3. Calving interval rata-rata 22 bulan

Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir hingga mencapai 40 kg, untuk bobot potong sapi rata-rata 400 kg dan calving interval rata-rata 13 - 14 bulan.

b) Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak mencapai 33.877 ton dengan luas kebun HPT 1.355 Ha, dengan produksi hijauan mencapai 25 ton tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan yang baik dan bibit yang berkualitas. Produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 ton/ha/tahun.

c) Daya saing produk peternakan masih rendah

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang

dapat memenuhi kebutuhan baik local maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

- d) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau dan antar wilayah.

Penyakit hewan menular strategis (phms) di kaltim kejadiannya masih cukup tinggi seperti bvd, ibr, pullorum, anaplasmosis, tripanosomiasis, babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah ai, jembrana, bruceolosis. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di kaltim seperti rabies, salmonellosis, fasiolosis dan ai. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedic dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut.

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga Kaltim menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab karantina pertanian, sedangkan dinas peternakan dan kesehatan hewan Prov. Kaltim hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak.

Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas

hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point.

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medic dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada disetiap kecamatan.

Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan diagnostik laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu :

Penyidikan dan pengujian penyakit hewan (P2PH) meliputi Pengujian Serologi, Pengujian Virologi, Pengujian Parasitologi, Pengujianpatologi Anatomi.

Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, maka perlu penambahan tenaga penguji dan peningkatan SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan kemajuan teknologi yang ada. Prasarana dan sarana yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagai laboratorium type B telah memadai, namun adanya alat yang rusak maka diperlukan adanya perbaikan, perawatan dan pembelian alat yang baru. Seiring perkembangan teknologi diperlukan adanya upaya peningkatan kecanggihan peralatan yang ada guna efisiensi waktu, tenaga dan biaya untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas terhadap pelayanan laboratorium dan hasil uji yang kredible,

kepuasan konsumen adalah salah satu misi keberhasilan pelayanan dari UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

e) Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan wilayah komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

f) Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar local maupun nasional. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu :

Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan (P2KHP) meliputi uji Salmonella, uji E.coli, uji Staphylococcus, uji Colliform , uji Total Plate Count (TPC).

Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

g) Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal

Perusahaan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Perlu adanya sosialisasi/edukasi dan pembinaan terhadap peternakan rakyat terkait akses permodalan seperti KUR, AOTS, KTS, selain itu perlu peningkatan akses informasi tentang perizinan usaha peternakan agar investor mau berusaha di Kalimantan Timur.

h) Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah

Ada kecenderungan bahwa peternak tidak mempunyai kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan permasalahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan, atau faktor nilai budaya yang ada. Terbatasnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk berternak yang lebih baik. Sehingga kualitas, kuantitas produksi peternakan tidak optimal. Hal tersebut ditandai dengan populasi dan produktifitas komoditas peternakan yang belum mencukupi ketersediaan dan keamanan pangan. Oleh karena itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap peternak maupun petugas lapangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak maupun petugas agar dapat meningkatkan usaha dibidang peternakan. Selain itu memberikan informasi dan teknologi dalam budidaya peternakan secara continue.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Sasaran Kinerja	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan			104	104,5	102	102	102	102,54	102	102	102	
2	Produksi Daging (Ton)			82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08	80.917,96	73.274,74	74.740,23	76.235,08	
	Produksi Telur (Ton)			11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04	11.386,31	14.148,65	14.290,14	14.433,04	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sudah menjadi acuan, namun RENSTRA 2018-2023 belum menjadi acuan karena pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota lebih dahulu dilaksanakan, sehingga keterkaitan dengan renstra Kabupaten/Kota masih dengan Renstra dengan periode sebelumnya seperti:

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian”.
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2019 – 2023: “Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”.
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016–2021: "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021: “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinerjis dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016–2021: “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016–2021: 1) Meningkatkan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, 2) Meningkatkan kinerja perikanan tangkap dan budidaya serta nilai tambah

industri perikanan, 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.

9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 adalah “Terwujudnya Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Tangguh Berwawasan Agribisnis”.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan”.

B. Keterkaitan Koordinasi dan Sinergi Program Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut:” Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”. Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional dan modern

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak

2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan

C. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan mendesak dalam pengembangan peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan produktivitas ternak rendah
2. Produksi dan produktivitas hijauan pakan ternak masih rendah.
3. Daya saing produk peternakan masih rendah
4. Kawasan peternakan belum optimal
5. Kaltim belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
6. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal
7. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal
8. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah

Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah
2. Pemasaran hasil bibit dan benih belum optimal
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular (PHM) belum maksimal
4. Pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner belum optimal
5. Produk lokal daging sapi dan telur masih rendah

D. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2019 – 2023.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam kurun waktu 2011-2019 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan

oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan Sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang

d. Konsistensi penganggaran

Rencana kerja yang telah disusun sudah memuat rencana kebutuhan pendanaan dalam satu tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten dengan penganggaran tersebut sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal.
- c. Pemoangan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan pemoangan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemoangan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kaltim bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat

E. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat.

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (dalam ton)

No.	Kab / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	S a p i	8.804,18	9.393,51	10.961,24	12.444,65	10.694,27
2	K e r b a u	122,83	295,16	1.360,47	1.667,58	2.391,48
3	Kuda	1,05	1,46	0,18	0,63	1,81
4	Kambing	529,22	637,88	745,89	693,59	826,10
5	Domba	19,26	12,10	8,32	11,07	36,25
6	Babi	888,00	883,23	1.400,94	1.803,70	1.830,40
7	Ayam Buras	5.008,03	5.690,21	4.798,66	4.592,02	4.657,96
8	Ayam Petelur	360,84	352,42	452,21	365,77	522,29
9	Ayam Pedaging	55.925,75	61.706,02	63.028,77	69.243,31	60.372,41
10	I t i k	199,48	263,21	392,71	499,28	644,86
11	Kelinci	5,82	6,68	6,32	3,95	4,82
12	Puyuh	6,59	4,39	6,76	6,19	7,48
13	Merpati	1,09	1,09	1,05	1,25	1,31
14	Itik Manila	15,81	22,53	26,87	26,89	33,12
Jumlah		71.887,95	79.324,00	83.190,37	91.362,30	82.024,57

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Berdasarkan data konsumsi maka konsumsi daging hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 konsumsi daging mencapai 82.024,57 ton. Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 tahun terakhir mencapai 69.243,31 ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kaltim. Saat ini perkembangan ternak ayam ras broiler sudah sepenuhnya ditangani swasta, pemerintah hanya sebagai regulator saja.

Konsumsi daging sapi mulai tahun 2016-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 ton dibandingkan dengan tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 ton. Apabila dibanding dengan tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 16,68% dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 12.444,65 ton atau peningkatan sebesar 11,9%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang menyebabkan turunya permintaan akan daging sapi.

Tabel 2.13 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016– 2020 (dalam ton)

No.	Jenis Telur	2016	2017	2018
1	Ayam Buras	1.728,72	1.735,14	1.46
2	Avam Petelur	15.163,50	19.028,65	20.56

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Struktur konsumsi telur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah konsumsi telur mencapai 18.025,39 ton. Pada tahun 2017 konsumsi telur naik signifikan atau mencapai 22.043,43 ton. Pada tahun 2018 konsumsi telur juga mengalami kenaikan mencapai 23.495 ton dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan menjadi 21.614,04 ton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan adapun kenaikannya adalah 2016 ke 2017 sebesar 22% dan dari 2017 ke 2018 naik sebesar 6,5% dan turun pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2020 menjadi 23.667,39 ton.

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kaltim diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkebunan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi mini ranch.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

Data populasi ternak mulai tahun 2016-2020 tercatat naik dengan rasio 0,26% untuk Sapi, 4,88% untuk kambing, 18,69 Domba, 2,6% Babi, -1,52% Kuda, ayam 4,08 dan itik paling tinggi sebesar 8,56% dan itik manila 14,49%, disamping kenaikan beberapa jenis ternak juga mengalami penurunan seperti sapi perah -1,31%, kerbau -3,27%, ayam buras -1,8%, kelinci -4,58% dan puyuh 3,65% perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 2.14 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	S a p i	118.712	119.123	117.504	119.485	119.974	0,26
2	Sapi Perah	97	107	110	91	87	-2,68
3	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.552	-2,14
4	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929	4,88
5	Domba	320	281	439	590	635	18,69
6	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	83.652	2,60
7	Kuda	101	91	97	102	95	-1,52
8	Ayam Buras	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	-1,80
9	Ayam Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	9,69
10	Ayam Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	-0,56
11	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	254.749	7,26
12	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.89	10.830	-4,58
13	Puyuh	68.643	46.693	66.593	65.808	79.222	3,65

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
14	Merpati	4.182	4.163	4.027	4.776	5.015	4,65
15	Itik Manila	25.215	35.934	42.851	42.890	52.823	20,31

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada tahun 2016-2020 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 128;0;0;25;20 unit.

F. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan dengan strategi peningkatan produksi pangan asal ternak, dan arah kebijakan yang terdiri dari Peningkatan Produksi Ternak Berkualitas dan Pengembangan Kawasan Peternakan. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)
Prioritas Pembangunan 2								
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	10.087.388.200
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	21%	7.387.968.000

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Perangkat Daerah

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam RKPD tahun 2022

Tabel 2.15 Review Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					55.029.190.800	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					54.679.547.000
02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					46.784.190.800	02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					47.781.000.500
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang	%	81		27.784.190.800	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang	%	81		27.805.522.546
3.27.01.1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,20		1.550.000.000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,20		1.515.000.000
3.27.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	790.000.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	17	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	750.000.000	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	725.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		18.631.160.800	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		18.606.510.800
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	26	smd dan ppu	17.844.190.800	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	26	smd dan ppu	17.844.190.800
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	smd	703.370.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	smd	678.720.000
		Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	Tim	1	smd				Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	Tim	1	smd	
		Jumlah Tim Pengamanan Aset	Tim	1	smd				Jumlah Tim Pengamanan Aset	Tim	1	smd	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	smd	83.600.000	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	smd	83.600.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		488.581.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		488.581.000
3.27.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	380	smd	269.801.000	3.27.01.1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	324	smd	269.801.000
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	218.780.000	3.27.01.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	39	smd dan luarProv	218.780.000
3.27.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		1.832.706.873	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		1.768.806.873
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	Bulan	12	smd	19.799.634	3.27.01.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrik	Bulan	12	smd	19.799.634
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Bulan Unit	12 14	smd smd	368.123.000	3.27.01.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	41	smd	392.823.000
3.27.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	10	smd	5.000.000	3.27.01.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	10	smd	5.000.000
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	smd	141.124.239	3.27.01.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	119	smd	199.444.239
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	15.360.000	3.27.01.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	15.360.000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	165	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	1.283.300.000	3.27.01.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	154	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	1.136.380.000
3.27.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	80		1.492.424.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	80		1.630.012.000
3.27.01.1.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	Unit	1	smd	1.368.800.000	3.27.01.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Unit	4	smd	1.060.800.000
3.27.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	2	smd	63.524.000	3.27.01.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	1	smd	31.962.000
3.27.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	3	smd	60.100.000	3.27.01.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	7	smd	37.250.000
3.27.01.1.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perencanaan pembangunan gedung kantor	Dokumen	1	smd	-	3.27.01.1.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perencanaan pembangunan gedung kantor	Dokumen	1	smd	500.000.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		2.301.590.707	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		2.525.988.939
3.27.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	2800	smd	103.453.200	3.27.01.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	2800	smd	106.423.745
3.27.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	252.710.035	3.27.01.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	299.436.562
3.27.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	1.945.427.472	3.27.01.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	2.120.128.632
3.27.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	80		1.487.727.420	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	80		1.270.622.934
3.27.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	63	smd	34.212.000	3.27.01.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	27	smd	34.212.000
3.27.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	268.837.500	3.27.01.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	242.937.500
3.27.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	1.101.947.920	3.27.01.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	910.743.434
3.27.01.1.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	smd	82.730.000	3.27.01.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Unit	113	smd	82.730.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran	%	21		8.425.000.000	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran	%	21		6.431.379.754
3.27.02.1.0 1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	75		1.475.000.000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	75		846.000.000
3.27.02.1.0 1.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	unit usaha	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, brn, mahulu dan	625.000.000	3.27.02.1.01. 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	unit usaha	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, brn, mahulu dan	366.600.000
3.27.02.1.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	Rp	150.000.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, brn, mahulu dan	850.000.000	3.27.02.1.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	Rp	150.000.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, brn, mahulu dan	479.400.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	17		2.300.000.000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	17		1.276.800.000
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok	3	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok	3	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	530.400.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	Indeks	1,71	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	Indeks	1,71	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	536.400.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	350.000.000	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	210.000.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		600.000.000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		1.279.368.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Luas lahan/kebun bibit HPT	Ha	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang Disediakan	Stek/Pols	200000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	694.325.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, Bahan Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	sampel	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	300.000.000	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, Bahan Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	sampel	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	585.043.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	11		850.000.000	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	11		883.500.000
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	sampel	13	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	sampel	13	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	683.500.000
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	unit usaha	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	unit usaha	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.0 7	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		3.200.000.000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		2.145.711.754
3.27.02.1.0 7.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	ekor	92	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.200.000.000	3.27.02.1.07. 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	ekor	92	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	2.145.711.754
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	%	49		5.500.000.000	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49		10.023.538.200
3.27.03.1.0 1	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	49		5.500.000.000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	49		10.023.538.200
3.27.03.1.0 1.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	Unit	49	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	5.500.000.000	3.27.03.1.01. 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	Unit	49	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	10.023.538.200
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		2.875.000.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		2.141.860.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13		
3.27.04.1.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		650.000.000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		842.860.000
3.27.04.1.0 1.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	Kab/Kota	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	250.000.000	3.27.04.1.01. 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	Kab/Kota	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	364.550.000
3.27.04.1.0 1.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	Kompartemen	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	3.27.04.1.01. 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	Kompartemen	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	261.510.000
3.27.04.1.0 1.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	Lokasi	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	3.27.04.1.01. 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	Lokasi	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	216.800.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.0 2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	2		1.250.000.000	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	2		750.000.000
3.27.04.1.0 2.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000	3.27.04.1.02. 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	60.000.000
3.27.04.1.0 2.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Kab/Kota	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000	3.27.04.1.02. 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Kab/Kota	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	90.000.000
3.27.04.1.0 2.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	900	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000	3.27.04.1.02. 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	900	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000
3.27.04.1.0 4	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		575.000.000	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		309.000.000
3.27.04.1.0 4.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	575.000.000	3.27.04.1.04. 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan	309.000.000
3.27.04.1.0 5	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	10		400.000.000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	10		240.000.000
3.27.04.1.0 5.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	Unit	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000	3.27.04.1.05. 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	Unit	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	240.000.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	50		1.050.000.000	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	50		714.500.000
3.27.06.1.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	30		700.000.000	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	30		364.500.000
3.27.06.1.0 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah peternak debitur sektor peternakan	Orang	60	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000	3.27.06.1.01. 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	Kegiatan	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	364.500.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	1		350.000.000	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	1		350.000.000
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	Orang	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	250.000.000	3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	Orang	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	250.000.000
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	unit usaha	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000	3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	unit usaha	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	44		1.150.000.000	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	44		664.200.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		600.000.000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		360.000.000
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	360.000.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	20		550.000.000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	20		304.200.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	30	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	550.000.000	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	30	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	304.200.000
02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					4.800.000.000	02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					3.867.864.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Peternakan	%	81		3.300.000.000	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Peternakan	%	81		3.055.757.736
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		131.040.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		132.600.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	ppu	131.040.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	ppu	132.600.000
3.27.01.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		164.000.000	3.27.01.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		155.000.000
3.27.01.1.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	110	ppu	97.750.000	3.27.01.1.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	110	ppu	97.750.000
3.27.01.1.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	8	ppu	66.250.000	3.27.01.1.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	ppu	57.250.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 <u>6</u>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		678.925.868	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		430.854.252
3.27.01.1.0 <u>6.01</u>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	Bulan	12	ppu	8.774.368	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrik	Bulan	12	ppu	10.903.002
3.27.01.1.0 <u>6.02</u>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Bulan Unit	12 12	ppu	72.250.000	3.27.01.1.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang	Unit	41	ppu	72.250.000
3.27.01.1.0 <u>6.05</u>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	ppu	15.301.500	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	156	ppu	15.301.250
3.27.01.1.0 <u>6.06</u>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	ppu	6.000.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	ppu	6.000.000
3.27.01.1.0 <u>6.09</u>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	140	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	576.600.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	326.400.000
3.27.01.1.0 <u>7</u>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		87.600.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		87.600.000
3.27.01.1.0 <u>7.06</u>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat elektronik	Unit	1	ppu	87.600.000	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat elektronik	Unit	1	ppu	87.600.000
3.27.01.1.0 <u>8</u>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.537.587.132	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.458.739.484
3.27.01.1.0 <u>8.01</u>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	250	ppu	20.795.308	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	250	ppu	20.795.308
3.27.01.1.0 <u>8.02</u>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	ppu	126.338.000	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	ppu	126.338.000
3.27.01.1.0 <u>8.04</u>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Bulan	12	ppu	1.390.453.824	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	ppu	1.311.606.176

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		700.847.000	3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		790.964.000
3.27.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	20	ppu	9.150.000	3.27.01.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	12	ppu	9.150.000
3.27.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	ppu	147.902.000	3.27.01.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	ppu	134.102.000
3.27.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	3	ppu	543.795.000	3.27.01.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	2	ppu	647.712.000
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	21		1.500.000.000	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	21		812.106.264
3.27.02.1.0 3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	65		1.500.000.000	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	65		812.106.264
		Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	800					Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	800		
3.27.02.1.0 3.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	ekor	20	smd, ppu, luarProv	600.000.000	3.27.02.1.03. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	ekor	15	smd, ppu, luarProv	305.706.264
3.27.02.1.0 3.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Pols	6000	smd, ppu, luarProv	900.000.000	3.27.02.1.03. 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Pols	6000	smd, ppu, luarProv	506.400.000
02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.445.000.000	02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.030.682.500
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Peternakan	%	81		2.045.000.000	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Peternakan	%	81		2.217.082.500
3.27.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		158.520.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		148.920.000
3.27.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	smd	158.520.000	3.27.01.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	smd	148.920.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		122.120.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		122.120.000
3.27.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	45	smd	34.120.000	3.27.01.1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	46	smd	34.120.000
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	12	smd	88.000.000	3.27.01.1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	14	smd	88.000.000
3.27.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		497.969.791	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		426.693.357
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	Bulan	12	smd	5.042.573	3.27.01.1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrik	Bulan	12	smd	5.042.573
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Bulan Unit	12 12	smd	65.300.000	3.27.01.1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang	Unit	11	smd	65.300.000
3.27.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	3	smd	2.318.000	3.27.01.1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Lusin	14	smd	2.318.000
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	smd	19.761.218	3.27.01.1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	300	smd	20.522.784
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	3.840.000	3.27.01.1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	3.840.000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	51	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	340.774.000	3.27.01.1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	35	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	268.736.000
3.27.01.1.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	Kegiatan	1	smd	60.934.000	3.27.01.1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	Kegiatan	1	smd	60.934.000

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		32.379.750	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		492.610.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	3	smd	21.729.750	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	smd	492.610.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	20	smd	10.650.000	3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	20	smd	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		812.880.059	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		817.486.243
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	300	smd	22.727.035	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	300	smd	23.133.219
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	157.724.184	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	161.924.184
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	632.428.840	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	632.428.840
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		421.130.400	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		209.252.900
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	8	smd	6.380.900	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	4	smd	6.380.900
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	122.700.000	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	103.980.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	292.049.500	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	98.892.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	smd	-	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	smd	-

RANCANGAN AWAL RENJA 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		1.400.000.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		813.600.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13		
3.27.04.1.0	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	14		1.400.000.000	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	14		813.600.000
3.27.04.1.0	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sertifikat hasil uji	Sertifikat Hasil Uji	228	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sertifikat hasil uji	Sertifikat Hasil Uji	228	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	406.800.000
3.27.04.1.0	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis produk asal hewan	analisis	91	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis produk asal hewan	Analisis	91	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	406.800.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

TABEL 2.16
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Kutai Barat	Pengembangan Mini Ranch	3 Mini ranch	
2	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan Mini Ranch	5 Mini ranch	
3	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Mini Ranch	4 Mini ranch	
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengembangan Mini Ranch	3 mini ranch	
5	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Paser	Pengembangan Mini Ranch	3 Miniranch	
6	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kabupaten Berau	Pengembangan Mini Ranch	6 Mini ranch	
7	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kota Bontang	Pengembangan Mini Ranch	1 Mini ranch	
8	Permohonan Bantuan Bibit Sapi Bali (Kelompok Tani Sapi "Hidup Jaya").	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. Penyuluh Pertanian dan Peternakan Kec. Tenggarong Seberang, Rekom Dinas Pertanian dan Peternakan Kab/Kota, Sudah Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota Namun Belum Memiliki Nomor Register
9	Permohonan Bantuan Budidaya Sapi Bali (Kelompok Tani "Urip Maring II"). Tahun Pembentukan 12 Agustus 2020	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Kelompok Tani "Urip Maring II" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, Rekomendasi PPL, UPT. P4 Kec. Telen,
10	Permohonan Bantuan Kambing (Kelompok Tani "Buana Surya"). Tahun Pembentukan 21 November 2018	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Kelompok Tani "Buana Surya" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Tidak Ada Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
11	Permohonan Bantuan Kambing (Kelompok Tani "Jaya Bersama") Tahun Pembentukan 20 Mei 2014	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Kelompok Tani "Jaya Bersama" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Rekomendasi PPL, Tidak Ada Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
12	Mohon Bantuan Ternak Sapi Bali Bakalan 50 Ekor (Kelompok Tani "Lajau Indah"). Tahun Pembentukan 9 Januari 2011	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Kelompok Tani "Lajau Indah" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Ketua Rt, Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. P4 Kec. Muara Bengkal, Tidak Ada Rekom Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
13	Permohonan Bantuan Untuk Budidaya Pengembangan Ternak Sapi (Kelompok Tani Ternak "Joyo Boyo"), Tahun Pembentukan 15 Desember 2019	Kabupaten Kutai Timur	-	-	Kelompok Tani Ternak "Joyo Boyo" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Ketua RT, Kepala Desa, Kantor Camat, Rekomendasi PPL, Tidak Ada Rekomendasi Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
14	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Kambing (Kelompok Tani Ternak "Bakti Lestari"), Tahun Pembentukan 18 Oktober 2016	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	Kelompok Tani Ternak "Bakti Lestari" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Petinggi Kampung, Tidak Ada Rekomendasi Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
15	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi (Kelompok Sapi "Radak Sangokng"), Tahun Pembentukan 21 Februari 2020	Kabupaten Kutai Barat	-	-	Kelompok Sapi "Radak Sangokng" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Petinggi Kampung, Kantor Camat, BPP. Kec. Jempang, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
16	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi Bali (Kelompok Tani "Puti Jaya"), Tahun Pembentukan 01 Juli 2020	Kabupaten Kutai Barat	-	-	(Kelompok Tani "Puti Jaya" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Petinggi Kampung, Kantor Camat, BPP. Kec. Barong Tongkok, Akta Notaris, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
17	Permohonan Bantuan Bibit Ternak Sapi Bali (Kelompok Ternak "Lembu Jaya"), Tahun Pembentukan 03 Agustus 2020	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	(Kelompok Ternak "Lembu Jaya" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kec. Loa Kulu, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
18	Permohonan Bantuan Kegiatan Pengadaan Ternak Kambing PE serta Kandang (Kelompok Peternakan Kambing "Sido Makmur"), Tahun Pembentukan 18 Juli 2020	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Kelompok Peternakan Kambing "Sido Makmur" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Kepala Desa, Kantor Camat, UPT. Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kec. Marangkayu, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
19	Permohonan Bantuan Biogas (Kelompok Tani "Sumber Tani Makmur"), Tahun Pembentukan 15 Desember 2017	Kabupaten Berau	-	-	Kelompok Tani "Sumber Tani Makmur" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Akta Notaris, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota
20	Permohonan Bantuan Biogas (Kelompok Tani "Karya Makmur")	Kabupaten Berau	-	-	Kelompok Tani "Karya Makmur" mengirimkan proposal ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Berasal Dari Kepala Kampung, Akta Notaris, Belum Ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Belum Ada Nomor Register SIMLUHTAN Dari Bid. Penyuluhan Kab/Kota

Tabel 2.17
Daftar Usulan Langsung (ASPIRASI) Yang Sudah di verifikasi oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2022

No.	Kode	Tgl Usul	Tgl Pengajuan	Pengusul	Profil	Permasalahan	Usulan	Urusan	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda	Kategori Usulan
1	6072b4bb55d2a	11-04-2021	11-04-2021	BAPPEDA Kab. Paser	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Kebun Kelapa Sawit di Kab. Paser sebagian besar dalam proses kegiatan replanting sehingga aktifitas sapi yang biasa dipelihara dengan pola semi intensif tidak dapat dilakukan lagi dikarenakan kondisi pohon sawit baru ditanam serta tingginya angka kematian kelahiran anak sapi maka diperlukan pagar mini ranch dan kandang singgah untuk mencegah sapi memakan tanaman kelapa sawit dan menghindari perselisihan masyarakat petani ternak dengan petani pekebun serta meningkatkan pengembangan ternak	Pengembangan Miniranch	Pertanian	1. Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Suatang, 2. Kelompok Tani Karya Taka Desa Bekoso dan 3. Kelompok Tani Mandiri Sejahtera Desa Keresik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kab. Paser, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : DIPROSES ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER
2	6072b503a7155	11-04-2021	11-04-2021	BAPPEDA Kab. Paser	Bappeda Kab/Kota	Kondisi Kebun Kelapa Sawit di Kab. Paser sebagian besar dalam proses kegiatan replanting sehingga aktifitas sapi yang biasa dipelihara dengan pola semi intensif tidak dapat dilakukan lagi dikarenakan kondisi pohon sawit baru ditanam serta tingginya angka kematian kelahiran anak sapi maka diperlukan pagar mini ranch dan kandang singgah untuk mencegah sapi memakan tanaman kelapa sawit dan menghindari perselisihan masyarakat petani ternak dengan petani pekebun serta meningkatkan pengembangan ternak	Pengembangan Miniranch	Pertanian	Kelompok Tani Berkah RT. 009 Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : DIPROSES ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER

Tabel 2.18
Daftar Usulan Reses (POKIR) Yang Sudah di Verifikasi oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2022

No.	Kode	Tgl Usul	Tgl Pengajuan	Pengusul	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Setwan	Kategori Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
1	RS6066fe806eb42	02-04-2021	02-04-2021	Yenni Eviliana, S.E	PKB	Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	pengadaan ternak sapi kelompok tani "adang Jaya Makmur" guna meningkatkan ekonomi	Pertanian	20 Ekor	Pok. adang Jaya Makmur, Kab. Paser, Long Ikis, Tajur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0	Belanja Transfer	Rekomendasi : DIPROSES ketahapan selanjutnya dengan pertimbangan (melengkapi dokumen pendukung) Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0
2	RS60673cab0a81b	02-04-2021	02-04-2021	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging ternak jenis Sapi Limosin oleh Kelompok Tani "FAJAR LESTARI"	Pertanian	15 Ekor	Blok H RT. 07 Dusun Suka Damai, Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Pulung Sari	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 15 Ekor Anggaran : 0	renja	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0
3	RS60695ceb622e4	04-04-2021	04-04-2021	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging ternak oleh Kelompok Tani "PEMUDA MANDIRI"	Pertanian	20 Ekor	Kampung Kajang, Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Singa Geweh	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0
4	RS60695e6f8372c	04-04-2021	04-04-2021	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging ternak oleh Kelompok Tani "KAJANG BERSEMI"	Pertanian	20 Ekor	Kampung Kajang RT. 03, Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Singa Geweh	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0
5	RS606961f221f8c	04-04-2021	04-04-2021	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal ternak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging ternak jenis Sapi Bali oleh Kelompok Tani "KARYA ETAM BERSAMA II"	Pertanian	20 Ekor	Jl. Kampung Batu Arang RT. 53 Dusun I Kabo Jaya, Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Swarga Bara	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 20 Ekor Anggaran : 0

No.	Kode	Tgl Usul	Tgl Pengajuan	Pengusul	Fraksi	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien	Alamat	OPD Tujuan	Rekomendasi Setwan	Kategori Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
6	RS606c771b7472f	06-04-2021	06-04-2021	Agjel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal temak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging temak sapi oleh Kelompok Tani "BERDIKARI SEJAHTERA"	Pertanian	11 Ekor	Jl. Arif Rahman Hakim No. 22 RT. 40, Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 11 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 11 Ekor Anggaran : 0
7	RS60704ab0e4afe	09-04-2021	09-04-2021	Agjel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal temak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging temak sapi oleh Kelompok Tani "HARAPAN BARU SEJAHTERA"	Pertanian	14 Ekor	Jl. Slamet Riyadi RT. 22, Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 14 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 14 Ekor Anggaran : 0
8	RS60704bffa80e	09-04-2021	09-04-2021	Agjel Suwarno, S.E, M.Si	PDI-P	Masih rendahnya produksi pangan asal temak	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, dan produksi daging temak sapi oleh Kelompok Tani "PELANGI JUANG SEJAHTERA"	Pertanian	11 Ekor	Jl. Arif Rahman Hakim No. 22 RT. 40, Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi : PROSES DAPAT DILANJUTKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN Koefisien : 11 Ekor Anggaran : 0	Non Belanja Transfer	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Proposal dan Foto ada, usulan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Usulan dapat di Proses Koefisien : 11 Ekor Anggaran : 0

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rencana Kerja Pemerintah 2022, dengan tema “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”, maka untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2022 tersebut maka Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam lima program prioritas yaitu:

- Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- Nilai tambah dan daya saing industri
- Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Dukungan manajemen

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging pada tahun 2022 sebesar 4,59 juta ton yang merupakan penyediaan protein hewani.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih. Target produksi ekspor tahun 2022 sebesar 376, 052 Ton

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah “**Penguatan Daya Saing Saing Daerah Guna Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)**”

Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2022 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan 2022 adalah “Pengembangan Mini Ranch untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Peternakan”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
 - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
 - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
 - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan
 - d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
 - e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
 - f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah,

pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019–2023 Rencana Kinerja Tahun 2022 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

Indikatornya meliputi:

Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,37

B. Sasaran Renja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging maka sasaran tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya produksi pangan asal ternak

Indikatornya meliputi :

- **Produksi Daging (Ton)**
- **Produksi Telur (Ton)**

(2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

Indikatornya meliputi :

- **Nilai Tukar Peternak (NTP)**

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya pendapatan peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	103
B.	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	<u>Produksi (Ton):</u> - Daging - Telur	74.740,23 14.290,14

3.3. Program dan kegiatan

A. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dituangkan ke dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Visi:

Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan Visi yaitu:

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemandirian, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. BERDAULAT memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus

on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERa, DAmai, unggUL, dan kuAT**.

MISI :

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia.

Misi Kedua:

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi Ketiga:

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi Keempat:

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi Kelima:

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 2 yaitu: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pada misi ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam Terwujudnya Pengembangan Mini Ranch untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat.

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada tahun 2021 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian:
- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi meliputi sub kegiatan:
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
- f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan :
- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :
- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
- Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
- e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan, yang harus dijabarkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengembangannya.

Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 54.679.547.000,-** (***Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah***).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2022 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2022, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2022, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2022. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih tearah.

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2022 pada tabel 4.1

TABEL 4.1
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN
TAHUN 2022

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					54.679.547.000	02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					62.000.000.000
02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					47.781.000.500	02.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					53.020.000.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	81		27.805.522.546	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%	82		33.220.000.000
3.27.01.1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,40		1.515.000.000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79,45		1.950.000.000
3.27.01.1.0	1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	790.000.000	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	12	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000
3.27.01.1.0	1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	725.000.000	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000
3.27.01.1.0	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		18.606.510.800	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		20.412.979.880
3.27.01.1.0	2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	26	smd dan ppu	17.844.190.800	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	26	smd dan ppu	19.628.609.880
3.27.01.1.0	2.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	smd	678.720.000	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan	12	smd	715.970.000
		Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	Tim	1					Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	Tim	1		
		Jumlah Tim Pengamanan Aset	Tim	1					Jumlah Tim Pengamanan Aset	Tim	1		
3.27.01.1.0	2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	smd	83.600.000	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	smd	68.400.000

KODE	RKPD Tahun 2022						KODE	Perkiraan Maju Tahun 2023					
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		488.581.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80		488.581.000
3.27.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	324	smd	269.801.000	3.27.01.1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	324	smd	269.801.000
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	39	smd dan luarProv	218.780.000	3.27.01.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	smd dan luarProv	218.780.000
3.27.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		1.768.806.873	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	80		2.073.017.854
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	smd	19.799.634	3.27.01.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	smd	19.799.634
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	41	smd	392.823.000	3.27.01.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	14	smd	514.599.000
3.27.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	10	smd	5.000.000	3.27.01.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Buah	10	smd	5.000.000
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	119	smd	199.444.239	3.27.01.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	119	smd	141.759.200
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	15.360.000	3.27.01.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	15.360.000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	154	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.136.380.000	3.27.01.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	170	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.376.500.020

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		1.630.012.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		4.497.338.120
3.27.01.1.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	Unit	4	smd	1.060.800.000	3.27.01.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	Unit	1	smd	1.368.800.000
3.27.01.1.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	1	smd	31.962.000	3.27.01.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit	4	smd	127.048.000
3.27.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	7	smd	37.250.000	3.27.01.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	7	smd	60.100.000
3.27.01.1.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perencanaan pembangunan gedung kantor	Unit	1	smd	500.000.000	3.27.01.1.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia	Unit	1	smd	2.941.390.120
3.27.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		2.525.988.939	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		2.301.595.726
3.27.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	2800	smd	106.423.745	3.27.01.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	2900	smd	103.458.219
3.27.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	299.436.562	3.27.01.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	252.710.035
3.27.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	2.120.128.632	3.27.01.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	1.945.427.472

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.270.622.934	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.496.487.420
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	27	smd	34.212.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	63	smd	34.212.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	242.937.500	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	274.145.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	910.743.434	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	1.101.947.920
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Unit	113	smd	82.730.000	3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Unit	113	smd	86.182.500
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	21		6.431.379.754	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		8.750.000.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	75		846.000.000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	unit usaha	76		1.650.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	unit usaha	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	366.600.000	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	unit usaha	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	700.000.000
3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	Rp	150.000.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	479.400.000	3.27.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	Rp	175.000.000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	17		1.276.800.000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan	16,5		2.500.000.000
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok	3	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	530.400.000	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.200.000.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	Indeks	1,71	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	536.400.000	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	Indeks	1,7	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	950.000.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	210.000.000	3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	350.000.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		1.279.368.000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	sampel	40		800.000.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	Stek/Pols	200000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	694.325.000	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	Stek/Pols	200000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, Bahan Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	sampel	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	585.043.000	3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, Bahan Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	sampel	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	11		883.500.000	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	Sampel	13		600.000.000
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	sampel	13	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	683.500.000	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	sampel	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	450.000.000
3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	unit usaha	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000	3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	unit usaha	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		2.145.711.754	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok	10		3.200.000.000
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	ekor	92	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	2.145.711.754	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	ekor	200	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	3.200.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49		10.023.538.200	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	30		5.200.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	49		10.023.538.200	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit	30		5.200.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	Unit	49	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	10.023.538.200	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	Unit	30	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	5.200.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		2.141.860.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		3.250.000.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		842.860.000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/Kota	10		900.000.000
3.27.04.1.0 1.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	Kab/Kota	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	364.550.000	3.27.04.1.01. 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	Kab/Kota	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000
3.27.04.1.0 1.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	Kompartemen	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	261.510.000	3.27.04.1.01. 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	Kompartemen	25	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000
3.27.04.1.0 1.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	Lokasi	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	216.800.000	3.27.04.1.01. 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	Lokasi	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.0 2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Check point	2		750.000.000	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint	3		1.350.000.000
3.27.04.1.0 2.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Laporan	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	60.000.000	3.27.04.1.02. 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Laporan	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	150.000.000
3.27.04.1.0 2.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Kab/Kota	2	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	90.000.000	3.27.04.1.02. 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Kab/Kota	3	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	200.000.000
3.27.04.1.0 2.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	900	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000	3.27.04.1.02. 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor	1000	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	1.000.000.000
3.27.04.1.0 4	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		309.000.000	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit usaha	2		600.000.000
3.27.04.1.0 4.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	309.000.000	3.27.04.1.04. 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	40	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	10		240.000.000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha	11		400.000.000
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	Unit	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	240.000.000	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	Unit	16	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	400.000.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	50		714.500.000	3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%	75		1.200.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	30		364.500.000	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha	35		800.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	Kegiatan	5	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	364.500.000	3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	Kegiatan	3	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000
3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	1		350.000.000	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi	2		400.000.000
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	Orang	10	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	250.000.000	3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	Orang	15	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	300.000.000
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	unit usaha	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000	3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	unit usaha	1	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	100.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	44		664.200.000	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%	45		1.400.000.000
3.27.07.1.0 2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		360.000.000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali	12		800.000.000
3.27.07.1.0 2.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	360.000.000	3.27.07.1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	Dokumen	4	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000
3.27.07.1.0 3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	20		304.200.000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok	25		600.000.000
3.27.07.1.0 3.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	30	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	304.200.000	3.27.07.1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	35	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	600.000.000
02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					3.867.864.000	02.00	UPTD. PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK					5.220.000.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	81		3.055.757.736	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		3.520.000.000
3.27.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		132.600.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		125.760.000
3.27.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	ppu	132.600.000	3.27.01.1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	ppu	125.760.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		155.000.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		259.850.000
3.27.01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	110	ppu	97.750.000	3.27.01.1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	110	ppu	77.000.000
3.27.01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	ppu	57.250.000	3.27.01.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	ppu	182.850.000
3.27.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		430.854.252	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	80		816.436.488
3.27.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	ppu	10.903.002	3.27.01.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	ppu	12.861.488
3.27.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	41	ppu	72.250.000	3.27.01.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	41	ppu	508.735.000
3.27.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	156	ppu	15.301.250	3.27.01.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	156	ppu	3.000.000
3.27.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	ppu	6.000.000	3.27.01.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	ppu	3.840.000
3.27.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	326.400.000	3.27.01.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	50	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	288.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		87.600.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		67.900.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat elektronik	Unit	1	ppu	87.600.000	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat elektronik	Unit	1	ppu	67.900.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.458.739.484	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		1.534.984.732
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	250	ppu	20.795.308	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	250	ppu	18.267.788
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	ppu	126.338.000	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	ppu	126.338.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Bulan	12	ppu	1.311.606.176	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	ppu	1.390.378.944
3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		790.964.000	3.27.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		715.068.780
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	20	ppu	9.150.000	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	20	ppu	12.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	ppu	134.102.000	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	ppu	139.798.780

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	3	ppu	647.712.000	3.27.01.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	2	ppu	-
							3.27.01.1.09. 11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	ppu	563.270.000
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	21		812.106.264	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	22		1.700.000.000
3.27.02.1.0 ^	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	65		812.106.264	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor	80		1.700.000.000
		Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	800					Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun	825		
3.27.02.1.0 3.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	ekor	15	smd, ppu, luarProv	305.706.264	3.27.02.1.03. 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	ekor	25	smd, ppu, luarProv	700.000.000
3.27.02.1.0 3.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Pols	6000	smd, ppu, luarProv	506.400.000	3.27.02.1.03. 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Pols	6500	smd, ppu, luarProv	1.000.000.000
02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.030.682.500	02.00	UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.760.000.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	81		2.217.082.500	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap urusan bidang peternakan	%	82		2.160.000.000
3.27.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		148.920.000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	80		110.000.000
3.27.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	smd	148.920.000	3.27.01.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Dokumen	12	smd	110.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		122.120.000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80		86.000.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	46	smd	34.120.000	3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	46	smd	20.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	14	smd	88.000.000	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	14	smd	66.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		426.693.357	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	%	80		472.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	smd	5.042.573	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Bulan	12	smd	7.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	11	smd	65.300.000	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	11	smd	40.000.000
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Lusin	14	smd	2.318.000	3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Lusin	14	smd	-
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	300	smd	20.522.784	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Ekslemplar	300	smd	25.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	3.840.000	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	Bulan	12	smd	5.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	35	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	268.736.000	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	35	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	325.000.000
3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	Kegiatan	1	smd	60.934.000	3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	Kegiatan	1	smd	70.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		492.610.000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	80		400.000.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	smd	492.610.000	3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	smd	400.000.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	20	smd	-	3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	0	smd	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		817.486.243	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		955.000.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	300	smd	23.133.219	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	Surat	330	smd	25.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	161.924.184	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	smd	180.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	632.428.840	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan	12	smd	750.000.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		209.252.900	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80		137.000.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	4	smd	6.380.900	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	8	smd	7.000.000

RKPD Tahun 2022							Perkiraan Maju Tahun 2023						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	103.980.000	3.27.01.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	Tahun	1	smd	130.000.000
3.27.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	1	smd	98.892.000	3.27.01.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit	0	smd	-
3.27.01.1.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	smd	-	3.27.01.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	Bulan	12	smd	-
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	60		813.600.000	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	%	70		1.600.000.000
		Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	13					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%	14		
3.27.04.1.0 3.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	14		813.600.000	3.27.04.1.03.	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	%	15		1.600.000.000
3.27.04.1.0 3.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sertifikat hasil uji	Sertifikat Hasil Uji	228	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	406.800.000	3.27.04.1.03. 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sertifikat hasil uji	Sertifikat Hasil Uji	262	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000
3.27.04.1.0 3.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis produk asal hewan	analisis	91	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	406.800.000	3.27.04.1.03. 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis produk asal hewan	analisis	105	smd, ppu, ktm, kkr, kbr, btg, bpn, psr, bru, mahulu dan luarProv	800.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

Dengan adanya RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2022. Kemudian RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Bhayangkara. No. 54 Telp. (0541) 743921-741642, Fax. 736228
Samarinda 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 086 Tahun 2021

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 2022
PEMBANGUNAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a) bahwa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) agar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2022 dapat tersusun, maka perlu ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja;
- c) bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim penyusunan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- Memperhatikan : DPA-SKPD Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 3-27.0-00.0-00.02.01 tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama** : Membentuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2022 adalah mengkompilasi dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Timur, Rencana Strategis Pembangunan Kalimantan Timur, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Nasional, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaran Kerja Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Juli 2021

Kepala Dinas,



Munawwar, ST. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671129 199803 1 003

Lampiran 1

Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
: 086 Tahun 2021
: 19 Juli 2021
: Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2022
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan dalam TIM
1.	<u>Munawwar, ST, M.Si</u> NIP. 19671129 199803 1 003	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
2.	<u>Fadli S, S.Sos.M.Si</u> NIP. 19741207 199403 1 003	Sekretaris	Ketua Merangkap Anggota
3.	<u>Mohammad Iqbal., ST</u> NIP. 19690829 199703 1 005	Kasubag Perencanaan Program	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	<u>Sahariminah</u> NIP. 19650823 199003 2 004	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
5.	<u>Deasi Fitriani, S.Pt</u> NIP. 19890629 201503 2 001	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
6.	<u>Rina Wardati, S.Pt</u> NIP. 19750226 201001 2 001	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
7.	<u>Delsi Isyawati, SE</u> NIP. 19751225 200701 2 016	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
8.	<u>Syamsul Bahri, S.Pt</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
9.	<u>Hendy Darmawan, S.Pt</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
10.	<u>Yogi Gunara Ryana, SE</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota
11	<u>Ichwan Rizani, S.IP</u> PPBASN	Staf Subag Perenc. Program	Anggota

Kepala Dinas,


Munawwar, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671129 199803 1 003

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 060 / 886 / Perenc/03/2021

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2021 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Plt.Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan timur Ibu **Ir. Hj. Sulastri, MP** tentang Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- b. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Kasubbid Pertanian dan Perikanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Ibu **Ir.Hj.Hidayanti Darma, MP** tentang Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- c. Paparan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ibu **Veridiana Huraq Wang, S.Pd, MM** tentang Arah, Kebijakan dan Dukungan Legislatif di Bidang Peternakan.
- d. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
J a m : 09.00 s.d 12.00 WITA
Tempat : Hotel Gran Senyur
Jln. ARS.Mohammad No.7 Balikpapan
Telp. (0542) 820211

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, tanggal 31 Maret 2021

Pimpinan Sidang
Plt.Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov Kaltim



Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Hj. Sulastri, MP	Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	
2.	Ir. IPG. Ngurah Suryawan, M.Si	Kepala UPTD PTHPT DPKH Prov. Kaltim	UPTD PTHPT DPKH Prov. Kaltim	
3.	Dr.drh. Rosmelati Situmeang, M.Kes	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet DPKH Prov. Kaltim	UPTD Lab Keswan dan Kesmavet DPKH Prov. Kaltim	
4.	Ir. Hj. Hidayanti Darma, MP	Kasubbid Pertanian dan Perikanan Bappeda Prov. Kaltim	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
5.	Veridiana Huraq Wang, S.Pd, MM	Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim	Sekretariat DPRD	
6.	Dr. Ir. Ibrahim, MP	Anggota TGUP3 Prov. Kaltim	TGUP3 (Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan) Prov. Kaltim	
7.	Ari Wibowo, S.Pt, M.Si, Ph.D	Dosen Asisten Ahli Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian	Universitas Mulawarman	
8.	Ajuansyah, S.SOs, MM	Plt. Kepala Dinas Pertanian Kutai Timur	Dinas Pertanian Kutai Timur	
9.	Suriansyah AK, S.Kh	Kepala Bidang Kehewana dan Peternakan DP3 Balikpapan	DP3 Balikpapan	
10.	drh. Al Habib	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Perkebunan dan Peternakan Paser	Dinas Perkebunan dan Peternakan Paser	

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
11.	I Putu Section, S.Pt, M.Si	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian dan Peternakan Berau	Dinas Pertanian dan Peternakan Berau	
12	M. Arif, SE	Kasubbag Penyusunan Program	Dinas Pertanian Penajam Paser Utara	



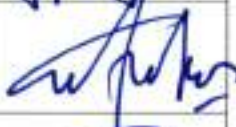














LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
 FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 NOMOR : 060/ /Perenc/03/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
 PERANGKAT DAERAH

Provisni : Kalimantan Timur
 Tanggal : 31 Maret 2021
 Tempat : Hotel Gran Senyuir

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Hj. Sulastri, MP	Pt. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim	
2	IBRAHIM		TPGUP3	
3.	SURIANSYOH Ak.	Kabid. Koh. Rekaman	DP3 Ballapapan	
4.	NOURAH. S	UPTD. PTHPT	DINAK	
5.	FADLI.S.	Salah	mpuch	
6.	MARTATIK	Kasi Pradaya & M. Sinar	DPK-UT	
7.	Ropie	perbitan	DPKH	
8.	Yulis Tanty	Kasi Kesmanet	DPKH Prov	
9.	Siti S. Sa'adah	Kasi P3H	DPHPT Prov.	
10.	Fadli . K	ka. ken	- - -	
11.	ARIM IG	- -	- -	
12.	Sriatun	P3H & OH.	Dinas Pacer	

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
13	Ridwan, Sp	Kasi Promosi & Pemasaran dpki	dpki prov.	
14	Ageng. S.	Staf PKUP	— " —	
15	M. Fatkhul Anam	KS - DUPP		
16	ASTRID KHAIRUNNISA	STAF UMUM	— " —	
17	Duta Setris	Kasub (Ker)	Restorasi Ben	
18	Ali Fajul		UPDPKHA	
19	Abdul Basid	Staf	DPKH Prov	
20	Haki	Kabid, KH KMU	Nasional Pakar	
21	Yobel	PKUP Staf	DPKH	
22	Novia wakid	Staf	DPKH	
23	Muhammad	Staf	DPKH	
24	Niken Pratiwi	Staf	DPKH	
25	Yanis Puspitasari	Staf	DPKH	
26	Agnas Syah	PK Cadu	Restorasi	
27	Cacab P.	Kabid P&B	DPKH	
28	Syahrial P.	Staf	DPKH	
29	Mukti. Ali	Staf	DPKH TK!	

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
30	Endra ARY	Staff		
31	Uuy Sanjaya	Ken	DPKH	
32	Vendram Wang	Km2	DPRD	
33	Hidaryanti Dora		Prappel	
34	Polici Afran		---	
35	Jamil Plus		---	
36	DACHLIAD	STAF TGUP3	TGUP3	
37	Rosnelz	Ka UPTD Ute		
38	M. ARIF	Kasubag penyusunan program	Dinas Pertanian PPU	
39	Pina Wardati	Perenc.	DPKH	
40	Yogi Gunara Pyana	Perenc	DPKH	
41	Ichwan Rizani	Perencanaan	DPKH	
42	Hendi Darmawan.	Perencanaan	DPKH	
43	M. IZAL.	Kasubag	DPKH	
44	Rahmat Budiso	Uman		
45	Meliana	Perencanaan	DPKH	
46	Samsul Bahw	Perenc	---	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
47	Drh. Pradipta Hendra Saputra	Dokter hewan karantina muda	SKP Kelas I Samarinda dan PDHI Kaltim 1	
48	Dr. Ludy K. Kristianto, S.Pt., MP.	Penyuluh	BPTP Kalimantan Timur	
49	Asrul Marhudi,SE	Auditor	Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	
50	Drh. Christine Susanti	Kasi Kesmavet, pp	Distan kab. Kutai Barat	
51	Nur Rizqi Bariroh	Peneliti	BPTP Kaltim	
52	FACHRUDDIN AZIZ	DOKTER HEWAN	EQUALINDO MAKMUR ALAM SEJAHTERA	
53	Ismawardi	subbag regram	Diskominfo prov.Kaltim	
54	Drh riyono	Kasi pelayanan kesehatan hewan	Dinas ketahanan pangan perikanan dan pertanian bontang	
55	Sumarsongko	Direktur LPPOM.MUI Prov.Kaltim	LPPOM.MUI Prov. Kaltim	
56	Sri Muryati	Kasi Kesmavet	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	
57	drh. Arief Murdiyatno	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian PPU	
58	SAPUTRI NUR	STAF PETERNAKAN BONTANG	STAF PETERNAKAN BONTANG	
59	Eddy forestwanto, S.STP M.Si	Kabid Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan perikanan dan pertanian Kota bontang	
60	Ir. R. Nor Hapsoro HZ., M.Si	Kabid Nak Keswan	Distanak Kukar	
61	Drh Endang Sri Pertiwi, Msi	Subkordinator substansi Karantina Hewan	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
62	Dhyani Nastiti P.	Koor Prog	BPTP Kaltim	
63	Sionita G Gunawan	Peneliti	BPTP KALTIM	

Samarinda, 31 Maret 2021
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

PIR Kepala



Ir. H. Sulastri, MP

Pembina Tingkat I

NIP. 19630520 199203 2 002

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

KODE RIKEMING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana peternakan (%) Peningkatan produksi produk ulahan pangan dan non pangan	75 % 6 %	80 % 7 %	9.925.000.000	10.450.000.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75 Unit Usaha	76 Unit Usaha	1.475.000.000	1.650.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Akutran dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	625.000.000	700.000.000
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150.000.000 Rp	175.000.000 Rp	850.000.000	950.000.000
3.27.02.1.03	Pemeliharaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Populasi ternak sapi bibit Produk HPT (Seger)	65 ekor 800 Ton/Tahun	80 ekor 820 Ton/Tahun	1.500.000.000	1.700.000.000
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	20 ekor	25 ekor	600.000.000	700.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	6.000 Stek/Polis	6.500 Stek/Polis	900.000.000	1.000.000.000
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Galang Intensif	1,2 Bulan	1,6 Bulan	2.300.000.000	2.500.000.000
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3 Kelompok	4 Kelompok	1.000.000.000	1.200.000.000
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Service per Conception	1,71 Indeks	1,70 Indeks	950.000.000	950.000.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pegawai Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek Jumlah petugas/ wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek Jumlah petugas/wasitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	10 Orang	10 Orang	350.000.000	350.000.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40 Sampel	40 Sampel	600.000.000	600.000.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Luas lahan/kebun bibit HPT Jumlah bibit HPT yang diproduksi	10 Ha	15 Ha	300.000.000	400.000.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50 Sampel	50 Sampel	300.000.000	400.000.000
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat/Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11 sampel	13 sampel	850.000.000	600.000.000
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Kualitas dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13 sampel	15 sampel	700.000.000	450.000.000
3.27.02.1.06.02	Perindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	4 unit usaha	4 unit usaha	150.000.000	150.000.000
3.27.02.1.07	Pemeliharaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok pemerinda ternak	10 Kelompok	10 Kelompok	3.200.000.000	3.200.000.000
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	200 ekor	200 ekor	3.200.000.000	3.200.000.000
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana peternakan	40 (%)	45 (%)	5.500.000.000	5.200.000.000
3.27.03.1.01	Pasokan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	25 Unit	31 Unit	5.500.000.000	5.200.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	25 Unit	25 Unit	5.500.000.000	5.200.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Keselamatan	Rasio wilayah yang bebas kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit zoonosis) terhadap total wilayah berisiko terdapat Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi HKV)	60 % 18 %	70 % 24 %	4.275.000.000	4.850.000.000
3.27.04.1.01	Penyediaan Kesehatan Hewan, Penjuragan dan Pembinaan Daerah Wilayah Persekit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit zoonosis, rabies, dan AI	10 Kabupaten	10 Kabupaten	650.000.000	900.000.000

KODE REKUNING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi	10.000 Ekor	10.000 Ekor	250.000.000	400.000.000
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen bebas kasus penyakit zoonosis	25 Kompartemen	25 Kompartemen	200.000.000	300.000.000
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	10 Lokasi	15 Lokasi	200.000.000	200.000.000
3.27.04.1.02	Pemantauan Pemukiman dan Pemeliharaan Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah (Satu) Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pemantauan lalu lintas hewan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantauan lalu lintas hewan	2 Checkpoint Kab/Kota	2 Checkpoint Kab/Kota	1.250.000.000	1.350.000.000
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa risiko penyakit hewan Jumlah analisa risiko produk asal hewan	1 Laporan	2 Laporan	100.000.000	150.000.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dari/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota	150.000.000	200.000.000
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	900 Ekor	1000 Ekor	1.000.000.000	1.000.000.000
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan (satu) Usaha Produk Hewan	Peningkatan Pemenuhan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	14 Persentase	15 Persentase	1.400.000.000	1.600.000.000
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Sertifikat Hasil Uji	228 Sertifikat Hasil Uji	262 Sertifikat Hasil Uji	700.000.000	800.000.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Analisis Produk Asal Hewan	91 Analisis	105 Analisis	700.000.000	800.000.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 Unit usaha	2 Unit usaha	575.000.000	600.000.000
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Keamanan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dilakukan sertifikasi MKV	5 Unit usaha	5 Unit usaha	575.000.000	600.000.000
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kasrawan	10 Unit usaha	11 Unit usaha	400.000.000	400.000.000
3.27.04.1.05.02	Pemanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan Kasrawan	15 Unit	16 Unit	400.000.000	400.000.000
3.27.06	Program Perlindungan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	99 %	75 %	1.800.000.000	1.200.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Amptukan (Usahanya) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemenuhan persyaratan	30 Unit usaha	25 Unit usaha	700.000.000	800.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Pemetapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah peternak debitur sektor peternakan	60 Orang	65 Orang	700.000.000	800.000.000
3.27.06.1.02	Penerbitan izin (usaha) Pengedar (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengedar obat hewan	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	250.000.000	400.000.000
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengedar Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengedar obat hewan	10 orang	15 orang	250.000.000	300.000.000
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengedar Obat Hewan	Jumlah distributor/pengedar obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	1 unit usaha	1 unit usaha	100.000.000	100.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan binaan kelompok temak	44 %	45 %	1.150.000.000	1.400.000.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12 Kali	12 Kali	600.000.000	800.000.000
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	800.000.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelompok Ekonomi Petani Berbasis Kasrawan	Jumlah kelompok temak yang terdaftar	20 Kelompok	25 Kelompok	550.000.000	600.000.000
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	Jumlah kelompok temak yang dibina Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	30 Kelompok	35 Kelompok	550.000.000	600.000.000
3.27.81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81 %	82 %	33.129.190.800	35.958.609.880
3.27.01.1.01	Pencapaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akurabilitas Kinerja	79,40 Nilai	75,45 Nilai	1.550.000.000	1.950.000.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000	1.000.000.000
3.27.01.1.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	17 Dokumen	17 Dokumen	750.000.000	950.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%	18.920.720.800	20.648.739.880
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	26 Dokumen	17.844.190.800	19.628.609.880
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SAPD Dinas	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN Jumlah Tim Pemantauan Arap Dinas Jumlah Tim Pengawasan Aset	12 Bulan 1 Tim 1 Tim	12 Bulan 1 Tim 1 Tim	701.370.000	715.370.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	158.520.000	110.000.000
		Jumlah Tim Penghapusan Barang UPTD Lab Keswan	Tim	Tim		
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD UPTD PTHPT	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	7 Bulan	7 Bulan	131.040.000	125.760.000
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	85.600.000	68.400.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	80 %	80 %	774.701.000	834.431.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	380 Setel	380 Setel	269.801.000	269.801.000
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	45 Setel	25 Setel	34.120.000	20.000.000
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD PTHPT	110 Setel	55 Setel	97.750.000	77.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 Orang	18 Orang	218.780.000	218.780.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	10 Orang	88.000.000	66.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD PTHPT	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	23 Orang	66.250.000	182.850.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	80 %	80 %	3.009.602.532	3.361.454.342
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas	Jumlah alat listrik	1 Tahun	1 Tahun	19.799.634	19.799.634
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah alat listrik	1 Tahun	1 Tahun	5.042.573	7.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PTHPT	Jumlah alat listrik	1 Tahun	1 Tahun	8.774.368	12.851.488
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	368.123.000	514.599.000
		Jumlah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Unit	14 Unit		
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	65.300.000	40.000.000
		Jumlah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	12 Unit		
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PTHPT	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	72.250.000	508.735.000
		Jumlah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	12 Unit		
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 Buah	10 Buah	5.000.000	5.000.000
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Buah	Buah	2.318.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	141.124.239	141.759.200
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	19.761.218	25.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PTHPT	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.301.500	3.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	15.360.000	15.360.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	3.840.000	5.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPTD PTHPT	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	6 Bulan	6 Bulan	6.000.000	3.840.000
3.27.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.283.300.000	1.376.500.020
3.27.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Lab Keswan dan Kesmawet	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	340.774.000	325.000.000
3.27.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PTHPT	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	576.600.000	288.000.000
3.27.01.1.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya informasi laboratorium	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.934.000	70.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	1.612.403.750	2.023.848.000
3.27.01.1.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PTHPT	Jumlah Pengadaan alat elektronik kantor	1 Unit	2 Unit	87.600.000	67.900.000
3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	1 Unit	1 Unit	1.368.800.000	1.368.800.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	2 Unit	4 Unit	63.524.000	127.048.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	3 Unit	3 Unit	21.729.750	400.000.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PTHPT	Jumlah Pengadaan Operasional Lapangan Roda Tiga UPTD PTHPT	- Unit	- Unit	-	-
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel Dinas	Jumlah mebel yang tersedia	3 Unit	3 Unit	60.100.000	60.100.000
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah mebel yang tersedia	20 Unit	Unit	10.650.000	
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	bulan	bulan		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	4.652.057.888	4.791.580.458
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12 Bulan	103.453.200	103.458.219
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12 Bulan	22.727.035	25.000.000
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PTHPT	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12 Bulan	20.795.308	18.267.788
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	252.710.035	252.710.035
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	157.724.584	160.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PTHPT	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	126.558.000	126.558.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	12 Laporan	12 Laporan	1.945.427.472	1.945.427.472
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	12 Laporan	12 Laporan	632.428.840	750.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PTHPT	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	12 Laporan	12 Laporan	1.390.453.824	1.390.378.944
3.27.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persiapan Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	2.609.704.820	2.348.556.200
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	63 Unit	63 Unit	54.212.000	54.212.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	8 Unit	6.580.900	7.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PTHPT	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20 Unit	20 Unit	9.150.000	12.000.000
3.27.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	1 Tahun	268.837.500	274.145.000
3.27.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	1 Tahun	122.700.000	130.000.000
3.27.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PTHPT	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	1 Tahun	147.902.000	139.798.780
3.27.01.1.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1.101.947.920	1.101.947.920
3.27.01.1.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PTHPT	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	1		292.040.503	
3.27.01.1.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PTHPT	Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	3 Unit	0 Unit	543.795.000	-
3.27.01.1.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	12 Bulan	12 Bulan	82.730.000	86.182.500
3.27.01.1.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PTHPT	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	0 Bulan	12 Bulan	-	563.270.000

Balikpapan, 31 Maret 2021



Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah Dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2022

KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		Kegiatan Yang bisa Dilakukan	ALASAN (Kendala dan Permasalahan dalam Pencapaian Target)	KESEPAKATAN
			75	%			
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		75	%			Menyikapi permasalahan terhadap pagu Renja tahun 2022, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim dan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota menyepakati dan mengharap agar pagu renja tahun 2022 minimal sama dengan tahun 2021. Sehingga program kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung visi ke-2 Gubernur Kalimantan Timur yaitu "Berdaya dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan".
3.27.02.1.01	Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian		75	Unit Usaha			
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	2	Unit Usaha	1. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Pangan 2. Pendampingan Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan Pangan 3. Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan Non Pangan 4. Pendampingan Kelompok Pengolahan Non Pangan 5. Pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan pangan 6. Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Organik 7. Uji Edar dan Uji Efektifitas Pupuk Organik 8. Surveilans Pupuk Organik 9. Sertifikasi Pupuk Organik	1. Kegiatan tersebut saling berkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya baik pengolahan hasil peternakan pangan maupun non pangan 2. Oleh sebab itu dengan adanya pengurangan anggaran (terbatas) maka kegiatan tidak bisa maksimal dilaksanakan sampai akhir tahun 3. Dengan mengurangi jumlah kegiatan maupun mengurangi jumlah pengadaan alat baik pangan maupun non pangan akan berdampak terhadap kegiatan pengolahan hasil peternakan pangan dan non pangan. 4. Oleh karena itu kegiatan pengolahan hasil peternakan baik pangan maupun non pangan sangat mendukung ekonomi kerakyatan (UMKM)	
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv		Rp			
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		62	Ekor			
			800	Ton / Tahun			
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	20	Ekor	1. Belanja N2 Cair 2. Belanja obat - obatan, vaksin dan dan desinfektan 3. Belanja alat penunjang laboratorium velvet 4. Belanja bahan penunjang laboratorium velvet 5. Belanja Kimia laboratorium velvet 6. Belanja alat penunjang laboratorium inseminasi buatan 7. Belanja kimia laboratorium inseminasi buatan 8. Belanja Peralatan kandang, Belanja kalibrasi alat, Belanja pemeliharaan laboratorium lab velvet, Belanja pengiriman sampel semen	Pengadaan bahan kimia dan sarana penunjang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga tidak optimal.	
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	6.000	Stok/Pol	1. Belanja Bahan kimia dan pupuk 2. Belanja peralatan kebun 3. Belanja pakan ternak	Pengadaan bahan kimia dan sarana penunjang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga produksi dan bibit hijauan pakan ternak (HPT) tidak optimal.	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		27	Balen			
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	3	Kelompok	- Pengadaan Biogas 10 Unit - Pendampingan Kelompok - Pelatihan Kelompok - Pembinaan Kelompok - Pembuatan Leaflet - Verifikasi kelompok	Pengadaan Biogas hanya dapat dilaksanakan 10 unit dari target 25	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	1,71	Indeks			
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPrv	10	Orang			

KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		Kegiatan Yang bisa Dilakukan	ALASAN (Kendala dan Permasalahan dalam Pencapaian Target)	KESEPAKATAN
3.27.02.1.05	Pengawasan dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Konsentrasian Provinsi		42	sampel			
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg, kkr, luarPtv	10	Ha	Luas lahan/kebun HPT hanya dapat terrealisasi 8 Ha	Anggaran yang kurang membuat Penanaman Bibit HPT mengalami Penurunan untuk kebutuhan Pakan Sapi di padang penggembalaan	
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg, kkr, luarPtv	50	Sampel	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian 10 Sampel	Terbatasnya dana membuat kegiatan Stimulan Pakan penguat untuk mengurangi kematian pedet dan peningkatan pendapatan tidak dapat optimal	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		11	sampel			
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg, kkr, luarPtv	13	sampel	1. Melakukan pengambilan sampel obat hewan di 4 kabupaten/kota (Bontang, Balikpapan, Paser dan Samarinda) 2. Mengirimkan sampel obat hewan untuk pengujian mutu ke BBPMSOH Bogor 3. Mengujikan sampel obat hewan ke BBPMSOH untuk analisa mutu dan keamanan obat hewan 4. Pengawasan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar di 4 Kabupaten/ Kota (Bontang, Balikpapan, Paser dan Samarinda) 5. Pengadaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan	1. Pengambilan sampel obat hewan tidak dapat dilakukan di semua kabupaten/kota sehingga obat hewan yang beredar di kabupaten kota tidak diketahui dan terjamin mutu, khasiat dan keamanannya 2. Tidak dapat melakukan analisa terhadap semua obat hewan yang beredar di kabupaten/kota untuk mengetahui mutu, khasiat dan keamanannya 3. Pengawasan terhadap kegiatan penyediaan, peredaran dan penggunaan obat hewan yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, menjadi tidak optimal karena tidak dapat melakukan di 10 kab/kota. 5. Penyediaan obat-obatan menghadapi risiko tidak mencukupi untuk pelayanan kesehatan hewan baik untuk kebutuhan insidentil maupun bukan insidentil.	
3.27.02.1.06.02	Pemindahan Alat Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		4	unit usaha	1. Pengadaan bahan/peralatan veteriner untuk fasilitas kegiatan pelayanan kesehatan hewan 2. Melakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan di distributor obat hewan (Samarinda dan Balikpapan) 3. Melakukan pertemuan sinkronisasi pengawas obat hewan 4. Melakukan pertemuan refresher petugas THL pelayanan kesehatan hewan se Kalimantan	1. Gangguan sistem pengadaan elektronik sehingga seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan 2. Tidak semua kabupaten/ kota dapat dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan 3. Gangguan jaringan internet selama acara berlangsung, mengingat peserta berasal dari kabupaten kota 4. Gangguan jaringan internet selama acara berlangsung, mengingat peserta berasal dari kabupaten kota	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain		10	Kelompok			
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg,	200	Ekor			
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		40	(%)			
3.27.03.1.01	Pembinaan Prasarana Pertanian		25	Unit			
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg, kkr, luarPtv	25	Unit	Mini ranch 15 Unit	Karena Terbatasnya anggaran maka target 25 Mini Ranch (untuk tahun 2022) tidak dapat terrealisasi	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan		60	%		Risiko target tidak ada kasus PHMS [Jembrana] tidak tercapai	
3.27.04.1.01	Pemantauan Kesehatan Hewan, Pemantauan dan Pembinaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Linxar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		10	Kab/Kota	Vaksinasi dan rangka Pengendalian Penyakit rabies hanya dapat dilakukan di 5 kab/kota	1. Target Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jembrana dan AI di 10 Kab/Kota tidak dapat di realisasikan 2. Target Pencegahan dan Pengendalian Penyakit rabies 10 kab/kota tidak optimal karena hanya dapat di realisasikan untuk 5 Kab/Kota	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	bru, pir, mah, kbr, smd, ppu, bpr, ktm, bbg, kkr, luarPtv	10.000	Ekor	Pengadaan vaksin Rabies 5.000 ds	1) Pengadaan vaksin Jembrana sebanyak 5.000 ekor tidak bisa direalisasikan, yang akan berdampak pada capaian kinerja. 2) Kesarnya risiko vaksinasi tidak terlaksana karena tidak cukup biaya untuk penyediaan bahan dan peralatan vaksinasi. 3) Pencapaian Target vaksinasi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran	

KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		Kegiatan Yang bisa Dilakukan	ALASAN (Kendala dan Permasalahan dalam Pencapaian Target)	KESEPAKATAN
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	25	Kompartemen	1) perjalanan di kota untuk melaksanakan vaksinasi oleh petugas di lapangan; 2) pengawasan dan pembinaan kompartemen bebas kasus Jembrana/PHM di kab/kota	1. vaksinasi tidak dilaksanakan petugas lapangan karena biaya perjalanan vaksinasi tidak mencukupi 2. risiko kompartemen bebas kasus jembrana tidak tercapai, karena pengawasan dan pembinaan kompartemen tidak optimal terkendala biaya tidak mencukupi	
3.27.04.1.01.03	Penganggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	10	Lokasi	Edukasi PHM ke 10 lokasi di kab/kota	Risiko tidak bisa menanggapi dan mengendalikan daerah terdampak bila ada kasus PHMS seperti AI, Brucella, Jembrana, Sumba, dan penyakit lainnya karena tidak ada bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan karena tidak cukup biaya	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemukiman dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		1	Checkpoint			
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	1	Laporan	1. Belanja cetak Laporan tahunan 2. Belanja perjalanan dinas dalam rangka penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	1. adanya refocusing anggaran berkurang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemukiman dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	1	Kab/Kota	1. Belanja cetak leaflet lalu lintas hewan 2. pengujian sampel RBT 3. Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel brucellosis 4. Belanja perjalanan dalam rangka pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemukiman dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	1. adanya refocusing anggaran berkurang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal	
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	540	Ekor	1. Pengadaan peralatan pengambilan sampel brucellosis 2. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk operasional 3. Belanja alat tulis 4. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor 5. belanja cetak laporan 6. belanja jasa kantor untuk honorarium tim pengawas lalu lintas hewan 7. belanja jasa kantor untuk honorarium petugas pelapor ISKHINAS 8. Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah provinsi	1. Adanya refocusing anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan checkpoint kabupaten berau tidak dapat dilaksanakan 2. Kurangnya sumber daya manusia terkait petugas pengawas lalu lintas pengawas lalu lintas hewan di daerah perbatasan 3. Kurangnya tenaga SOM khususnya petugas pelapor ISKHINAS di Kab/Kota	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		14	1			
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	bru, por, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bbg, kkr, luarPrv	228	Sertifikat Hasil Uji	1. Pengadaan Bahan Kimia Lab. Kewan 2. Pengadaan Bahan dan Sarana Penunjang Lab. Kewan 3. Pengadaan Peralatan Lab. Kewan 4. Surveilans dan monitoring penyakit Hewan 5. Kegiatan Akreditasi Lab. Kewan	1. Pengadaan bahan kimia terbatas sehingga pengujian dalam rangka pelayanan dan pengawasan penyakit hewan dan produk asal hewan tidak optimal 2. Pengadaan bahan dan sarana penunjang terbatas sehingga pengujian dalam rangka pelayanan dan pengawasan penyakit hewan dan produk asal hewan tidak optimal 3. pengadaan peralatan tidak dapat dilaksanakan sehingga pelayanan laboratorium tidak maksimal 4. surveilans dan monitoring penyakit hewan dan produk asal hewan tidak dapat dilakukan optimal sehingga pengawasan dan penyidikan penyakit hewan tidak maksimal terutama penyakit zoonosis (penyakit Brucellosis, Flu Burung, dan Rabies) dan pemakuan produk pangan (necoran bab,loraks, dan Formalin dll) 5. Penambahan ruang lingkup berakreditasi tidak dapat dilakukan sehingga pelayanan dan pengujian penyakit hewan dan produk asal hewan tidak optimal 6. pembelian sampel produk hewan tidak dapat dilakukan sepenuhnya sehingga pengawasan produk hewan yang beredar tidak optimal	

KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	Kegiatan Yang bisa Dilakukan	ALASAN (Kendala dan Permasalahan dalam Pencapaian Target)	KESEPAKATAN	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	brs, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPtv	93	Analisis	1. Pengadaan Bahan Kimia Lab. Kesmavet 2. Pengadaan Bahan dan Sarana Penunjang Lab. Kesmavet 3. Pengadaan Peralatan Lab. Kesmavet 4. Surveilans dan monitoring Pangan Asal Hewan 5. Kegiatan Akreditasi Lab. Kesmavet 6. Pembelian Sampel Pangan Asal Hewan	1. Dana terbatas sehingga pengadaan bahan kimia lab. Kesmavet untuk pengujian tidak dapat dilakukan sepenuhnya hal ini akan menyebabkan pelayanan dan pengawasan pangan asal hewan tidak optimal 2. Dana terbatas sehingga pengadaan bahan dan sarana penunjang lab. Kesmavet untuk pengujian tidak dapat dilakukan sepenuhnya hal ini akan menyebabkan pelayanan dan pengawasan pangan asal hewan tidak optimal 3. Dana terbatas sehingga pengadaan peralatan lab. Kesmavet untuk pengujian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga pelayanan laboratorium tidak maksimal 4. Dana terbatas sehingga kegiatan surveilans dan monitoring pangan asal hewan tidak dapat dilakukan sepenuhnya yang akan menyebabkan pengawasan dan penyidikan pangan asal hewan tidak maksimal 5. Dana terbatas akibat tidak dapat dilakukan penambahan ruang lingkup terakreditasi sehingga pelayanan pengujian dan pengawasan penyakit hewan dan produk asal hewan tidak optimal	
3.27.04.1.04	Sertifikasi Penyelamatan Teknik kesehatan Masyarakat Veteriner		2	Unit usaha			
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Persebitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	brs, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPtv	5	Unit usaha	1. Pengawasan Unit usaha NKV sebanyak 22 unit usaha di Balikpapan, Samarinda dan Bontang 2. Pembinaan Unit usaha produk hewan sebanyak 8 unit di Balikpapan, Samarinda dan Bontang 3. Sertifikasi NKV di Balikpapan, Bontang dan Samarinda	1. Tidak semua unit usaha NKV dilakukan pengawasan karena Unit usaha yang telah ber-NKV ada 67 unit usaha. 2. Tidak semua unit usaha produk hewan dilakukan pembinaan karena dari target 20 unit usaha hanya 8 unit usaha yang dilakukan pembinaan 3. Tidak semua unit usaha produk dilakukan sertifikasi NKV karena unit usaha yang telah mengajukan NKV ada di Kutim, Berau, Paser 4. Tidak semua unit usaha NKV dilakukan surveilans audit karena terkait Permentan Nomor 11 Tahun 2010 tentang sertifikasi NKV unit usaha produk hewan. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa masa berlaku NKV selama 5 tahun, sehingga unit usaha yang telah habis masa berlaku harus dilakukan perpanjangan NKV 5. Tidak semua unit usaha NKV dilakukan pengawasan melalui pengambilan dan pengujian produk hewan	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan		10	Unit usaha			
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	brs, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPtv	55	Unit	1. Pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutim dan Paser. 2. Pembinaan penerapan kesrawan pada unit usaha NKV di Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Paser 3. Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan hewan antemortem (sebelum disembelih) di samarinda, Balikpapan dan Bontang 4. Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging curban di samarinda 5. Fasilitas pemotongan hewan curban di samarinda	1. Tidak semua kab/bota dilakukan pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif 2. Tidak semua RPH/RPU yang telah ber-NKV dilakukan pembinaan penerapan kesrawan yaitu di PPU, Kutim dan Berau	
3.27.06	Program Perlindungan Usaha Pertanian		50	%			
3.27.06.1.01	Pembinaan Unit Usaha Pertanian yang Resilien, Utuh dan Berdaya Saing di Daerah Kabupaten/Kota		30	Unit usaha			
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Unit Usaha Pertanian	brs, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPtv	60	Orang			
3.27.06.1.03	Pembinaan Unit Usaha Pengoper (Toko, Retail, Sub Distributor) Gaset Hewan		10	Rekomendasi			

KODE REKENING	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		Kegiatan Yang bisa Dilakukan	ALASAN (Kendala dan Permasalahan dalam Pencapaian Target)	KESEPAKATAN
3.27.06.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	bru, pr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPv	10	orang	1. Melakukan edukasi izin usaha pengecer obat hewan di 2 kabupaten/ kota (Samarinda dan Balikpapan) 2. Melakukan pembinaan perijinan usaha pengecer obat di 3 kabupaten/ kota (Samarinda, PPU dan Kubar). 3. Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	1. Tidak semua usaha pengecer obat hewan di kabupaten/ kota dapat dilakukan edukasi 2. Tidak semua usaha pengecer obat hewan di kabupaten/ kota dapat dilakukan pembinaan 3.1 Tidak semua Puskesmas dapat difasilitasi (ada 27 Puskesmas di kabupaten/ kota)	
3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	bru, pr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPv	1	unit usaha	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha distributor obat hewan (Samarinda dan Balikpapan)	Tidak semua usaha distributor obat hewan di kabupaten/ kota dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan izin	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		44	%			
3.27.07.1.02	Pembinaan Penyuluhan Pertanian		12	Kel			
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru, pr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPv	4	Dokumen	Pertemuan verifikasi dan validasi peternakan	Informasi terkait data peternakan dari petugas kab./kota sering terlambat	
3.27.07.1.03	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		20	Kelompok			
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	bru, pr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, bng, kkr, luarPv	30	Kelompok	1. Pelatihan Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok 2. Validasi dan Verifikasi Usulan Proposal Kelompok 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Proposal Kelompok Bantuan Hibah Pemerintah Daerah 4. Melakukan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Kelembagaan Kelompok di Kab/Kota 5. Penyusunan Profile kelompok dan Buku Induk	Dengan adanya pengurangan anggaran mempengaruhi capaian target pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	



**Saran/Masukan Peserta Forum Perangkat Daerah
Tahun 2021**

No	Nama	Instansi	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	Drh. H. Sumarsongko	LPOK MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu sertifikasi halal pada RPH dan RPU agar daya saing produk peternakan meningkat. 2. Fasilitasi sertifikasi halal bagi sertifikat yang hampir habis masa berlakunya. 3. Perlu pelatihan juru sembelih halal se Kalimantan Timur agar produk pangan asal hewan yang dihasilkan terjamin sehingga tidak tergantung dari luar Kalimantan Timur.
2.	Drh. Al Habib	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan vaksin jembrana dengan mempertimbangkan jumlah real vaksinasi dan sesuai ambang minimal coverage vaksinasi (35% dari populasi). 2. Sarana dan prasarana Check Point perbatasan perlu ditingkatkan. 3. Perlu dukungan obat-obatan untuk mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) agar tergambar di anggaran.
3.	I Putu Setian, S.Pt, M.Si	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu difasilitasi checkpoint sebagai tempat keluar masuknya sapi ke Kaltara dan Kutim 2. Kurangnya tenaga dokter hewan dalam penanganan kelahiran sapi
4.	Surtansyah AK, S.KH	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan teknologi pakan agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani. 2. Perluasan areal HPT dengan mengoptimalkan Sumber Daya Genetik 3. Pola kemitraan untuk ternak sapi seperti kemitraan ayam potong
5.	Dr. Ir. H. Ibrahim, MP	TGUP3 Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian miniranch harus lebih diperjelas agar pengembangan sapi dengan pola miniranch dapat dilakukan sesuai dengan teknisnya. 2. Pembuatan miniranch skala kecil 3. Miniranch harus memiliki ketersediaan pakan yang cukup baik yang dipotong maupun yang digrazing serta kacang-kacangan.
6.	Ari Wibowo, S.Pt, M.Si, Ph.D	FAPERTA UNMUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bibit dan bakalan secara lokal 2. Keterampilan dan kemampuan peternak skala industri ditingkatkan
7.	Ir. Yakop Pangdongan, M.Si	Kabid perbibitan dan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan peternakan semakin berkurang setiap tahun. 2. adanya upaya khusus dari Pemerintah untuk mengatasi Replanting sawit di PPU yang berpengaruh terhadap populasi sapi di Paser.
8.	Drh. Arief Murdiyanto	Dinas Pertanian Kab. PPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran sapi harus dilakukan dengan sistem penimbangan (tidak dengan menakir) 2. Perlu investasi swasta dalam menyediakan bibit dan bakalan (bahan baku RPH) agar tidak mengganggu populasi sapi dalam pengembangannya, namun konsumsi masyarakat akan daging tetap terpenuhi. 3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis terutama penyakit jembrana perlu mendapat perhatian serius dengan cara penyediaan vaksin minimal 80% dari populasi di kompartemen-kompartemen dengan mengedepankan teknik epidemiologis lapangan. 4. Perlu dilakukan pemetaan kompartemen endemis, terancam/suspect dan bebas untuk menentukan kebutuhan vaksin
9.	Ir. H. Dachriadi	TGUP3 Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan miniranch banyak menemui permasalahan dan kendala maka perlu fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah dan kendala tersebut terutama penggunaan lahan.
10.	Dr. drh. Rosmelati Situmeang, M.Kes	Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan strategi yang tepat untuk mencapai swasembada daging di Kalimantan Timur diantaranya kawasan peternakan, melibatkan investor untuk bergerak dalam usaha peternakan, dan kemudian bermitra dengan peternak dengan rakyat. 2. Mengupayakan sistem budidaya yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi-potensi limbah sawit, mengolah kotoran ternak (padat dan cair) menjadi pupuk sehingga menambah penghasilan peternak.

Samarinda, 31 Maret 2021
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
Pt. Kepala

Ir. H. Sulastri, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19630520199203 2 002